

**ANALISIS KOMODITI BASIS SUBSEKTOR TANAMAN
PANGAN DI WILAYAH PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG
2001**

SKRIPSI



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

| | | |
|--------|------------------|-------|
| Asal | Halaman | Klass |
| Terima | Perabeking | 338.1 |
| No. 1 | Tgl. 21 NOV 2002 | JEF |
| | SRS. | a |
| | | e.1 |

Defri

NIM. 960810101122

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2002**

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS KOMODITI BASIS SUBSEKTOR TANAMAN
PANGAN DI WILAYAH PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG
2001**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : Jefri

N. I. M. : 960810101122

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

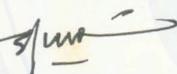
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

27 Juli 2002

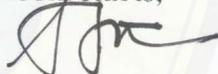
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas
Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,


Drs. Badjuri, ME
NIP. 131 386 652

Sekretaris,


Aisah Jumiati, SE. M.Si
NIP. 132 086 408

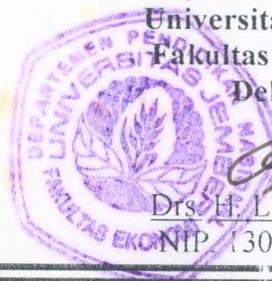
Anggota,


Dra. Sri Utami, SU.
NIP. 130 610 496



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,


Drs. H. LIAKIP, SU
NIP. 130 531 976



Surat Keterangan Revisi

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini benar-benar telah merevisi skripsinya.

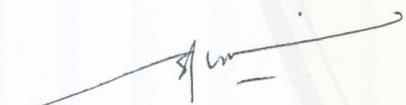
Nama Mahasiswa : Jefri
NIM : 960810101122
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)
Konsentrasi : Ekonomi Pertanian
Judul Skripsi : Analisis Komoditi Basis Sub-sektor Tanaman Pangan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2001.

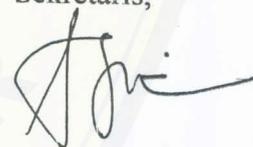
Demikian surat keterangan revisi ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Tim Penguji

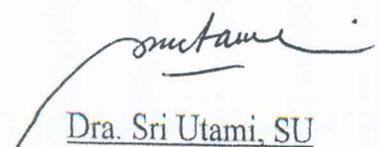
Ketua,

Sekretaris,


Drs. Badjuri, ME
NIP. 131 386 652


Aisah Jumiati, SE. M.Si
NIP. 132 086 408

Anggota,


Dra. Sri Utami, SU
NIP. 130 610 494

Disetujui: September 2002

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS KOMODITI BASIS SUB-SEKTOR TANAMAN
PANGAN DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN
MALANG 2001

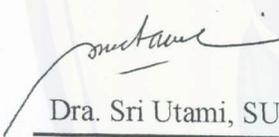
Nama : Jefri

NIM : 960810101122

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Pertanian

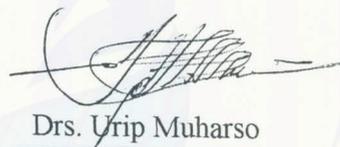
Pembimbing I



Dra. Sri Utami, SU

NIP. 130 610 494

Pembimbing II



Drs. Urip Muharso

NIP. 131 120 333

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM

NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : Juli 2002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan penulis kepada;

Almamater, Keluarga, Sahabat - ku

d a n

mereka yang mempunyai hasrat untuk mencapai cita-cita, visi yang besar, kepemimpinan yang dinamis, komitmen, semangat, rendah hati, mampu menghargai, menikmati harinya sebagai proses untuk bertumbuh dan berubah menjadi pribadi yang baik dan positif, tahu dimana ia berada dan kemana ia akan pergi, terlebih yang paling luar biasa kepada mereka yang memberikan hidupnya untuk membantu orang lain mendapatkan hidup yang mereka inginkan.

MOTTO

A man is not old until regrets take the place of dreams

--John Barrymore, actor

You only live once, but if you work it right, once is enough

-- Joe E. Lewis, Comedian

The beginning of every great success is desire

--Napoleon Hill, author of Think and Grow Rich

Your future is hidden in what you do daily

--Mike Murdock, author and motivational minister

Without a vision, the people perish

--Proverbs

Each morning when I look in the mirror, I'll be able to

honestly say to myself, I'm

a better person today than I was yesterday.

--Positive Affirmation

I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith

■ II Timothy 4 : 7

ABSTRAKSI

ANALISIS KOMODITI BASIS SUB-SEKTOR TANAMAN PANGAN DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 2001.

Konsep pertumbuhan ekonomi daerah memunculkan konsep-konsep tentang pertumbuhan daerah yang antara lain konsep teori basis (basic concept). Menurut basis pertumbuhan perlu dikonsepsikan sedemikian rupa yaitu dengan menggolongkan sektor, sub-sektor, dan komoditi yang dapat menjadi basis pertumbuhan dengan yang tidak menjadi basis. Oleh karena itu, perencanaan ekonomi yang mendampingi ekonomi pasar harus mampu menggolongkan sektor-sektor, sub-sub-sektor dan komoditi-komoditi basis. Sektor-sektor atau komoditi-komoditi yang dikategorikan sebagai sektor basis harus diperlakukan sebagai basis dalam pembangunan daerah. Sedangkan sektor atau komoditi yang bukan basis sebaiknya jangan diperlakukan secara berlebihan misalnya mendapat prioritas yang tinggi dalam pembangunan

Tujuan dari penelitian ini : (a) untuk mencari gambaran tentang komoditi basis dan bukan basis dalam sub-sektor tanaman pangan yang berkecenderungan melemah atau menguat dalam struktur perekonomian di Pemerintahan Kabupaten Malang; (b) untuk mengidentifikasi komoditi yang patut diprioritaskan dan memperoleh curahan dana dalam pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang pada umumnya.

Lokasi penelitian di Pemerintah Kabupaten Malang dengan menggunakan data sekunder urut waktu (time series) selama lima tahun yaitu tahun 1997 – 2001 untuk data jenis komoditi sub-sektor tanaman pangan. Sedangkan untuk data sub-sektor tanaman pangan sendiri menggunakan data urut waktu selama empat tahun yaitu tahun 1997 – 2000. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Malang serta literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data dianalisis secara kuantitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mengetahui gambaran tentang komoditi basis digunakan analisis location quotient (LQ). Untuk mengetahui gambaran tentang komoditi yang berkecenderungan melemah atau menguat digunakan analisis koefisien pergeseran (CR) dari perbandingan LQ yang kedua.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sub-sektor tanaman pangan memiliki $LQ > \text{satu}$ ($LQ = 1,11$) pada tahun 2000, yang mengandung arti bahwa sub-sektor tanaman pangan merupakan sektor basis yang berkecenderungan mengeksport produknya ke daerah lain. Komoditi – komoditi yang terdapat pada sub-sektor tanaman pangan yang memiliki $LQ > \text{satu}$ antara lain jagung sebesar 1,02, ubi kayu sebesar 2,12, dan ubi jalar sebesar 3,65 pada tahun 2001. Namun demikian, komoditi yang menguat secara positif hanya terdapat pada komoditi ubi kayu dan komoditi ubi jalar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kebijaksanaan pembangunan untuk Kabupaten Malang dalam bidang pertanian terutama sub-sektor tanaman pangan adalah menentukan prioritas kebijakan dengan tepat untuk mendukung komoditi basis yang berkecenderungan menguat dengan arah dukungan industri yang mampu secara bersama-sama meningkatkan perkembangan didalam pertumbuhan wilayah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan berkat-Nya atas selesainya penulisan skripsi yang berjudul “ ANALISIS KOMODITI BASIS SUB-SEKTOR TANAMAN PANGAN DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 2001”

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

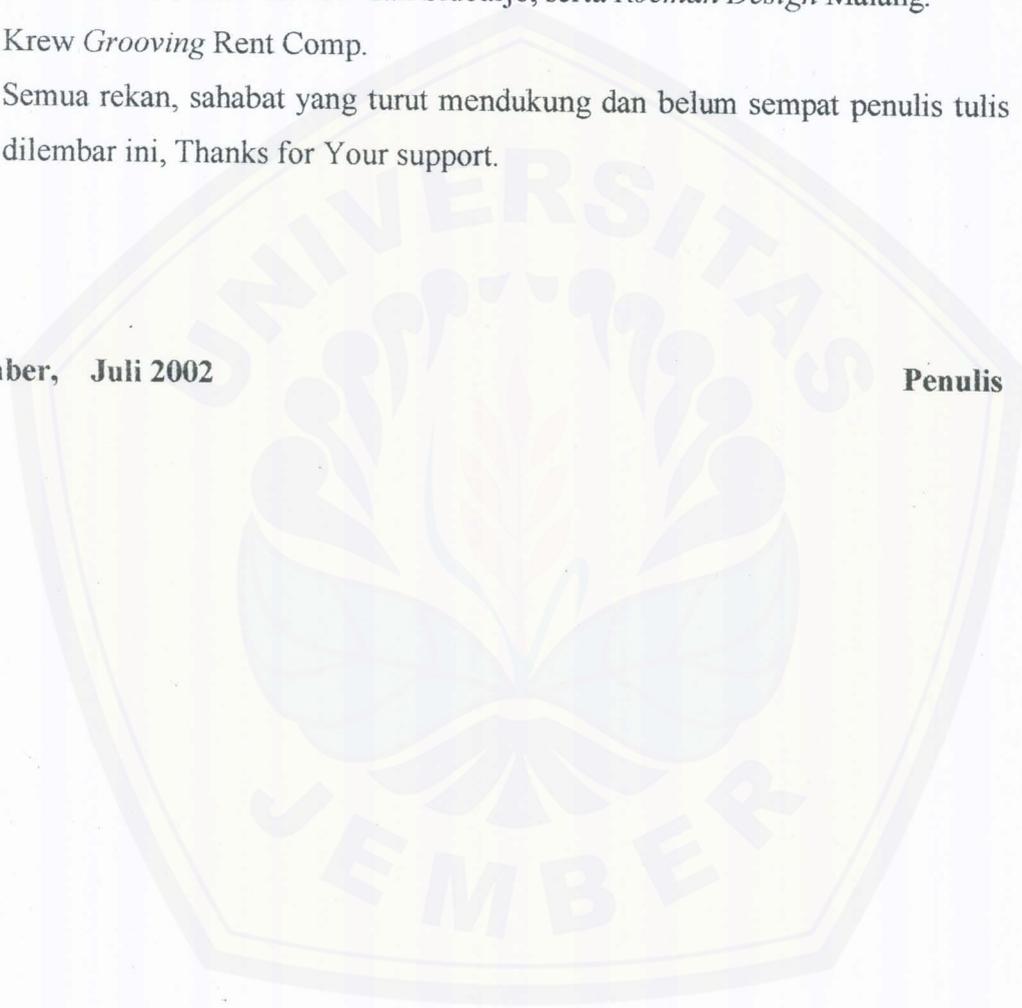
1. Dra Sri Utami, SU dan Drs Urip Muharso selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. H. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi beserta staff edukatif dan administratif.
3. Keluarga di Malang Ayahanda Zeth Poni Padang, SH dan Ibunda Yohana Kinan yang selalu mendorongku untuk menyelesaikan skripsi ini, adik-adikku Imelda dan Khaterina, serta keluarga Tana Toraja.
4. Keluarga di Jember kakak-ku Repang Basri SE.Akt se-Keluarga.
5. Staff Kantor Balai Pusat Statistik Kabupaten Malang.
6. Staff Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Malang.
7. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Senat Fakultas ekonomi Universitas Jember yang memberikan tempat dalam berinteraksi.
8. UKM Bola Basket Fakultas Ekonomi dan Universitas Jember.
9. PMK Fakultas Ekonomi dan UKKK Universitas Jember.
10. Teman-temanku di jurusan Studi Pembangunan semua angkatan.
11. Alumni *FKM2E* dan arek *Independent*.
12. Warga koss Jawa II/12, Ibu Busro dan keluarga, dan teman-temanku yang penuh keceriaan.
13. Sahabat – sahabatku di *Network 21* Indonesia, Ibu Maria Gunawan, Ibu Ani Susilowati, Bpk Sindhu dan Ibu Lenny Lindayani, special buat rekan dan

orang tua keduku Ibu Landrajany Sinjar, yang selalu memberikan motivasi, semangat, komitmen, dan sikap positif dalam segala hal.

14. Ikatan *Maharema* thanks atas kekompakan, kerjasama dan kerja keras dalam membina persahabatan selama di Jember.
15. Krew *Planet Photo* Jember dan Sidoarjo, serta *Roemah Design* Malang.
16. Krew *Grooving Rent Comp*.
17. Semua rekan, sahabat yang turut mendukung dan belum sempat penulis tulis dilembar ini, Thanks for Your support.

Jember, Juli 2002

Penulis

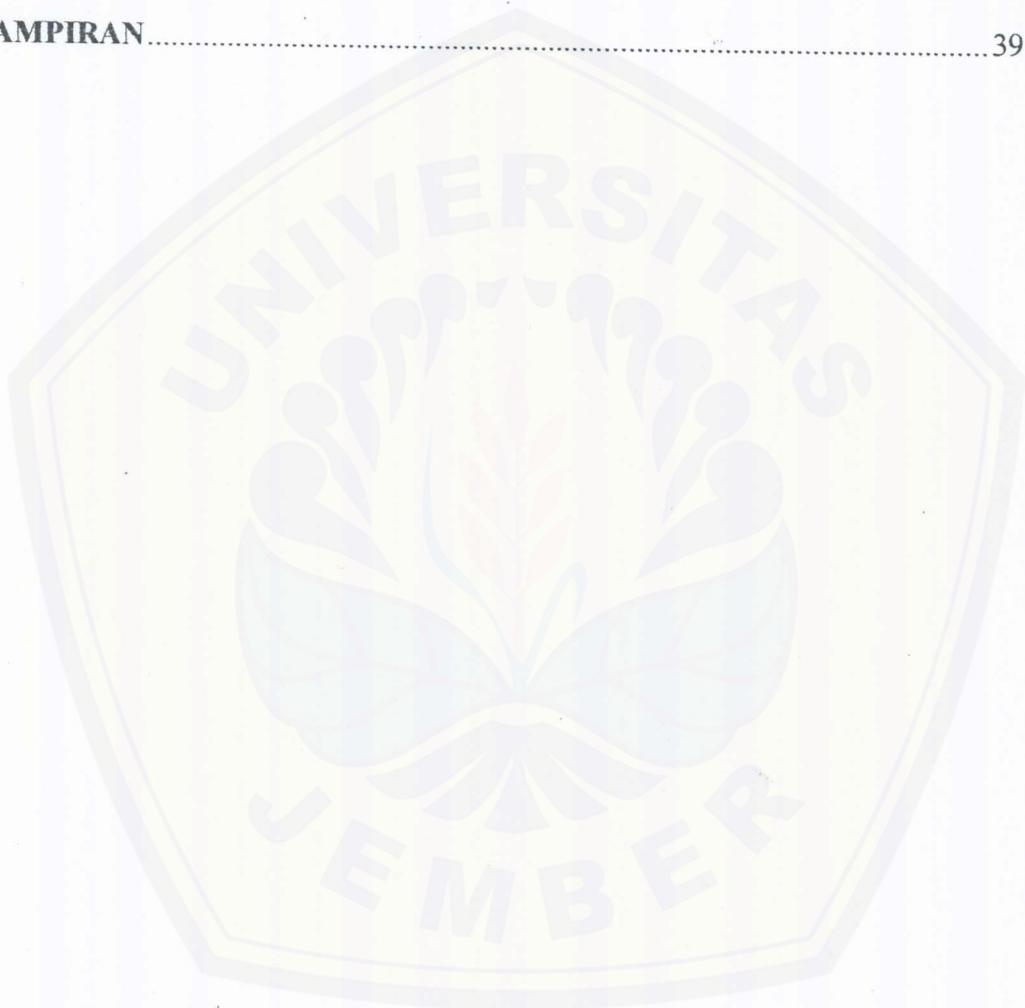


DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL SKRIPSI | i |
| HALAMAN REVISI | ii |
| HALAMAN TANDA PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAKSI | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian | 7 |
| II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya | 8 |
| 2.2 Landasan Teori | 8 |
| 2.2.1 Pembangunan Pertanian | 8 |
| 2.2.2 Syarat – syarat Pembangunan Pertanian | 9 |
| 2.2.3 Sektor Pertanian dalam Proses Transformasi Struktural | 11 |
| 2.2.4 Pentingnya Perencanaan Didalam Pembangunan Pertanian | 13 |
| 2.2.5 Arti dan Fungsi Perencanaan | 15 |
| 2.2.6 Ciri – ciri dan Tujuan Perencanaan Pembangunan | 17 |
| 2.2.7 Perencanaan Pembangunan Sektoral | 18 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3 Hipotesis..... | 21 |
| III METODE PENELITIAN..... | 22 |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 22 |
| 3.1.1. Jenis Penelitian..... | 22 |
| 3.1.2. Unit Penelitian..... | 22 |
| 3.2. Jenis dan Sumber Data | 22 |
| 3.3 Metode Analisis Data | 22 |
| 3.3.1 Metode Location Quotient (LQ)..... | 22 |
| 3.3.2 Metode Koefisien Pergeseran (CR)..... | 24 |
| 3.4 Definisi Variabel yang Dioperasikan dalam Penelitian | 25 |
| IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN..... | 27 |
| 4.1 Gambaran Umum Potensi Ekonomi Kabupaten Malang | 27 |
| 4.1.1 Tinjauan Ekonomi Kabupaten Malang..... | 27 |
| 4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Tinjau dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | 27 |
| 4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi di Tinjau dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan..... | 29 |
| 4.2 Penentuan Prioritas Pembangunan Pemkab Malang..... | 30 |
| 4.2.1 Keunggulan Komparatif PDsRB Sub-Sektor Tanaman Pangan Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 1997 – 2000..... | 30 |
| 4.2.2 Keunggulan Komparatif PDsRB Sub-Sektor Tanaman Pangan Berdasarkan Harga Konstan (th 93) tahun 1997 – 2000..... | 31 |
| 4.3 Analisis Penentuan Prioritas Pengembangan Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 1997 – 2001 | 31 |
| 4.4 Analisis Tingkat Pergeseran Komoditi-Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan di Pemerintah Kabupaten Malang Th 1997-1999 dan Tahun 1999-2001 | 34 |
| 4.5 Pembahasan..... | 35 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| V KESIMPULAN DAN SARAN | 37 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 37 |
| 5.2 Saran..... | 37 |
| DAFTAR PUSTAKA | 38 |
| LAMPIRAN | 39 |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1 : Peranan Sektoral (PDRB) Kabupaten Malang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1998-2000..... | 28 |
| Tabel 2 : Peranan Sektoral (PDRB) Kabupaten Malang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1998-2000..... | 29 |
| Tabel 3 : Hasil Perhitungan LQ PDsRB Sub-Sektor Tanaman Pangan Pemkab Malang Berdasarkan Harga Berlaku Th 1997-2000..... | 30 |
| Tabel 4 : Hasil Perhitungan LQ PDsRB Sub-Sektor Tanaman Pangan Pemkab Malang Berdasarkan Harga Konstan Th 1997-2000..... | 31 |
| Tabel 5 : Hasil Perhitungan LQ Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan Pemkab Malang Tahun 1997 - 2001..... | 32 |
| Tabel 6 : Hasil Perhitungan CR Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan Pemkab Malang Th 1997 – 1999 dan Th 1999 – 2001..... | 34 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran 1a : Data PDsRB Pemda Jatim dan PDsRB Pemkab Malang secara Sub-sektoral Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sub-Sektor Tanaman Pangan 1997-2000 | 39 |
| Lampiran 1b : Perhitungan LQ PDsRB Pemkab Malang Atas Pemda Jatim Pada Sub-Sektor Tanaman Pangan Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 1997 – 2000 | 40 |
| Lampiran 2a : Data PDsRB Pemda Jatim dan PDsRB Pemkab Malang secara Sub-sektoral Berdasarkan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Sub-Sektor Tanaman Pangan 1997-2000 | 41 |
| Lampiran 2b : Perhitungan LQ PDsRB Pemkab Malang Atas Pemda Jatim Pada Sub-Sektor Tanaman Pangan Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 1997 – 2000 | 42 |
| Lampiran 3a : Produksi Tanaman Bahan Makanan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dan Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Komoditi dan Palawija Tahun 1997 | 43 |
| Lampiran 3b : Perhitungan Location Quotient Komoditi Sub Sektor Tanaman Pangan Th1997 | 44 |
| Lampiran 4a : Produksi Tanaman Bahan Makanan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dan Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Komoditi dan Palawija Tahun 1998 | 45 |
| Lampiran 4b : Perhitungan Location Quotient Komoditi Sub Sektor Tanaman Pangan Th1998 | 46 |
| Lampiran 5a : Produksi Tanaman Bahan Makanan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dan Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Komoditi dan Palawija Tahun 1999 | 47 |
| Lampiran 5b : Perhitungan Location Quotient Komoditi Sub Sektor Tanaman Pangan Th 1999 | 48 |

| | | |
|--------------------|--|----|
| Lampiran 6a | : Produksi Tanaman Bahan Makanan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dan Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Komoditi dan Palawija Tahun 2000 | 49 |
| Lampiran 6b | : Perhitungan Location Quotient Komoditi Sub Sektor Tanaman Pangan Th 2000 | 50 |
| Lampiran 7a | : Produksi Tanaman Bahan Makanan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dan Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Komoditi dan Palawija Tahun 2001 | 51 |
| Lampiran 7b | : Perhitungan Location Quotient Komoditi Sub Sektor Tanaman Pangan Th1997 | 52 |
| Lampiran 8 | : Perhitungan Koefisien Pergeseran Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan di Pemerintah Kabupaten Malang 1997 – 1999 | 53 |
| Lampiran 9 | : Perhitungan Koefisien Pergeseran Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan di Pemerintah Kabupaten Malang 1999 – 2001 | 55 |



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prioritas yang ditentukan dalam pembangunan suatu daerah dibutuhkan pemikiran yang tepat untuk melihat potensi keunggulan sumber daya yang dimiliki. Hal ini merupakan perkembangan yang tidak bisa lepas dari pada perubahan yang terjadi didalam kebijakan pembangunan yang tidak lagi ditentukan mutlak oleh pemerintah pusat dan menunggu dana untuk pembangunan di daerah. Pemerintah daerah saat ini diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk memikirkan pembangunan di daerahnya sendiri. Tuntutan dalam pelimpahan kebijakan ini membawa dampak mau tidak mau pemerintah daerah dan sub-daerah harus melihat kondisi dan potensi ekonomi yang dapat membawa keuntungan secara efisien dan efektif didalam membangun tata perekonomian yang baik.

Perekonomian suatu wilayah atau negara yang dikendalikan oleh pasar, barang-barang dan jasa-jasa dihasilkan oleh individu-individu bagi pemenuhan kebutuhan pasar dan selanjutnya pasarlah yang mendistribusikan kepada konsumen yang secara geografis tersebar luas pada wilayah-wilayah pemukiman. Namun, karena sistem perekonomian pasar adalah suatu sistem yang bersifat bersaing, maka sistem ini mengintroduksi suatu mekanisme yang disebut mekanisme seleksi pasar.

Pasar akan menyeleksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan serta mendistribusikan barang-barang dan jasa-jasa yang bermutu baik dan harga relatif bersaing akan tetap eksis di pasar dan akan tetap bertahan dalam jangka panjang. Sebaliknya barang-barang dan jasa-jasa yang kurang bermutu dengan harga yang kurang bersaing akan tergeser dan cenderung menempati posisi marginal pasar dan selanjutnya dampak yang diberikan penghasil adalah *multiplier* yang rendah bagi pengembangan perekonomian daerah yang bersangkutan secara keseluruhan.

Untuk mendapatkan posisi yang mantap dipasar, pemerintah daerah harus mengembangkan spesialisasi yang berdasarkan pada keuntungan tempat yang menghasilkan *comparative advantage* bagi produk yang dihasilkan di pasar.

Dalam menentukan keunggulan komparatif, diperlukan suatu perencanaan yang berkesinambungan untuk mendukung ekonomi pasar tersebut. Hal ini dikarenakan jika suatu daerah didukung oleh produk atau komoditi yang memiliki daya saing maka secara tidak langsung akan memberikan manfaat pada daerah tersebut pertumbuhan ekonomi yang memiliki momentum semakin lama semakin kuat. Selain itu jika daerah tersebut mampu untuk menspesialisasikan jenis produknya maka produk tersebut akan mampu bersaing pada jangka waktu lama.

Perencanaan pembangunan harus meliputi seluruh aspek dan sektor perekonomian antara lain seperti pertanian, industri, prasarana dan jasa; di berbagai tingkat hirarkhis administratif seperti propinsi, kabupaten, dan desa. Didalam sektor pertanian dibagi lagi menjadi beberapa sub-sektor antara lain sub-sektor bahan makanan, sub-sektor perkebunan, sub-sektor peternakan, sub-sektor perikanan. Dari sub-sektor tersebut terdiri masing-masing komoditi yang memberikan kontribusi pendapatan pada pembangunan daerah. Komoditi yang dihasilkan oleh suatu daerah belum tentu sama dengan daerah lain baik itu secara kuantitas dan kualitas. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber-sumber yang ada dan penyebaran sumber-sumber yang tidak merata, sehingga semakin kita rasakan kebutuhan-kebutuhan akan pengamatan potensi daerah secara cermat dan menyeluruh diperlukan.

Hasil dari pembangunan selama ini telah terjadi transformasi struktural perekonomian Indonesia yang antara lain ditandai dengan berkurangnya sumbangan relatif pertanian pada PDB serta meningkatnya sumbangan relatif industri dan jasa pada PDB. Dilain pihak penurunan peran produk tanaman pangan sebagai bahan makanan pokok juga tidak diikuti dengan kebijakan yang mengarah kepada keberlanjutan penyediaan pangan yang berbasis kepada potensi sumberdaya lokal. Sebagai akibatnya, substitusi bahan makanan akibat meningkatnya pendapatan lebih mengarah pada bahan pangan yang dihasilkan oleh industri pengolahan pangan yang tidak memanfaatkan bahan baku lokal.

Eksistensi pembangunan ekonomi ini mengakibatkan terjadinya suatu pergeseran struktur produksi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Tetapi pada era pasca orde baru yaitu era reformasi sekarang ini, dimana

Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, sebagai akibat "*Snowing Ball Effect*" dari krisis nilai tukar rupiah terhadap US\$, maka fenomena sektor primer (pertanian) kembali menjadi primadona. Sebagai satu-satunya sektor ekonomi yang masih mampu memiliki pertumbuhan positif dimana pada tahun 1998 sektor pertanian tumbuh sebesar 0,26 % (positif), dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang memiliki pertumbuhan minus. Hal ini membuktikan bahwa dalam masa reformasi sektor pertanian menempatkan diri pada posisi strategis dan diharapkan dapat berperan sebagai "*leader sector*" dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini.

Berdasarkan potensinya dalam menghadapi guncangan, maka upaya pemulihan ekonomi dan penguatan landasan pembangunan nasional serta perekonomian nasional harus dikembangkan dengan basis sumber daya lokal, terutama subsektor tanaman pangan melalui strategi pembangunan agribisnis.

Pembangunan sistem pangan merupakan bagian pembangunan nasional yang strategis untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Ketahanan pangan mempunyai spektrum yang sangat luas, dari perspektif mikro dalam pemenuhan nutrisi setiap individu sampai dengan perspektif makro yang menjamin ketersediaan pangan ditingkat lokal, regional, maupun nasional. Dari spektrum tersebut terlihat bahwa ketahanan pangan mempunyai dua dimensi, yaitu ditingkat individu yang erat kaitannya dengan masalah pengentasan kemiskinan, dan di tingkat yang lebih luas akan terkait dengan masalah produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, dan prasarana penunjang, dan kelembagaan perdagangan.

Kecukupan ketersediaan pangan dan keterjangkauan ekonomi di tingkat individu atau rumah tangga merupakan faktor yang menentukan kondisi ketahanan pangan. Jumlah penduduk, kondisi geografis dengan potensi agroklimat yang berbeda, keterbatasan lahan subur akibat pengalihan fungsi lahan, dan degradasi kualitas lingkungan merupakan masalah yang harus dihadapi dalam menjamin penyediaan pangan yang berkelanjutan. Menurunnya kemampuan produksi pangan akibat dari kerusakan lingkungan dan konservasi lahan pertanian ke non pertanian serta terbatasnya prasarana pendukung pertanian seperti waduk

dan bendungan sebagai sumber air irigasi merupakan permasalahan dalam penyediaan pangan. Laju pertumbuhan produksi beras di Jawa yang menurun juga merupakan masalah yang dihadapi dalam produksi pangan.

Upaya diversifikasi yang masih belum berhasil, baik dari sisi produksi maupun konsumsi pangan, menyebabkan sebagian masyarakat masih sangat tergantung pada satu jenis bahan pangan yaitu beras. Sampai saat ini lebih dari setengah jumlah kalori serta lebih dari 40 persen karbohidrat yang dikonsumsi oleh masyarakat berasal dari beras. Oleh karenanya upaya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan merupakan bagian dari transformasi struktural yang harus dilakukan dalam kaitan ini, peningkatan pendapatan masyarakat dan urbanisasi merupakan dua kekuatan yang diharapkan dapat mendorong terjadinya proses diversifikasi produksi dan konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, diversifikasi bahan pangan diharapkan dapat mengatasi masalah ketidakstabilan harga bahan pangan yang menyebabkan ketidakpastian, baik bagi petani sebagai produsen maupun bagi masyarakat konsumennya.

Kemampuan lembaga-lembaga atau organisasi ekonomi masyarakat belum memadai di perdesaan dalam pengembangan sistem ketahanan pangan serta diversifikasi menyebabkan upaya alih teknologi dan akses informasi pasar oleh petani belum dapat berjalan dengan baik. Peranan kelembagaan petani setempat dalam mendukung ketahanan pangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan, antara lain akibat terlalu jauhnya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan sistem ketahanan pangan adalah peningkatan produktivitas pertanian yang merupakan dasar bagi peningkatan pendapatan petani, termasuk petani dalam kepemilikan lahan sempit. Sesudah berakhirnya revolusi hijau, saat ini Indonesia menghadapi masalah yang sangat berat di dalam peningkatan produktivitas, yaitu pengembangan bioteknologi dan perbaikan pengelolaan penggunaan input dalam produksi.

Titik tolak desentralisasi atau otonomi daerah menurut UU No 22 dan UU No 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah dibentuk mempunyai alasan salah satunya adalah bahwa pemerintah daerah

setingkat kota atau kabupaten merupakan daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah daerah setingkat kota atau kabupaten yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Atas dasar itulah prinsip otonomi yang dianut, yaitu otonomi yang nyata, bertanggung jawab, dan dinamis, diharapkan dapat lebih mudah direalisasikan. “Nyata” berarti otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif daerah. “Bertanggung jawab” mengandung arti pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan daerah diseluruh pelosok tanah air. “Dinamis” berarti pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Dengan berlakunya otonomi daerah maka pemerintah daerah mempunyai keharusan imperatif untuk merencanakan dan membangun kegiatan ekonomi yang didasarkan pada potensi daerah sendiri.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah diwilayah Propinsi Jawa Timur yang bercorak agraris sehingga sektor pertanian berperan besar dalam mendukung pembangunan daerah. Keadaan geografis daerah kabupaten Malang berbatasan dengan gunung-gunung baik yang aktif dan sudah mati, sehingga membawa implikasi sebuah daerah yang sangat subur. Hal ini juga ditunjang dengan curah hujan yang tinggi dan dengan adanya daerah aliran sungai serta adanya bendungan yang berada di Karangates yaitu bendungan Soetami dan di daerah Batu yaitu bendungan Solorejo menjadikan kawasan daerah Kabupaten Malang sangat baik dan potensial bagi pertanian terutama subsektor tanaman pangan. Saluran irigasi yang diciptakan membawa aliran air merata ke seluruh daerah kabupaten Malang. Dari keterangan diatas membawa kesimpulan bahwa pada musim kemaraupun daerah Kabupaten Malang mampu untuk bertahan. Pertanian di Kabupaten Malang meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, dan hasil-hasil kehutanan, serta perikanan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebesar 452.869 orang atau 85,2 persen dari jumlah penduduk bekerja yaitu 531.534 orang di Kabupaten Malang. (BPS, 1999)

Perekonomian daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang secara administratif berada dalam wilayah kekuasaan administratif pemerintah

Kabupaten Malang perlu dikategorikan ke dalam sektor-sektor atau kelompok-kelompok komoditi basis dan bukan basis, maksudnya adalah bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Malang dapat lebih tepat dalam menentukan prioritas-prioritas pengembangan pada subsektor dan kelompok komoditi yang ada. Ketepatan demikian itu perlu agar proses perkembangan daerah-daerah di wilayah Kabupaten Malang tetap tidak kehilangan momentumnya, bahkan momentum perkembangan itu sendiri semakin menguat, lebih luas dan agar perkembangan wilayah Kabupaten Malang dapat bersifat komplemen bagi perkembangan di wilayah lain di Propinsi Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang timbul adalah:

1. pendapatan daerah yang belum maksimal membutuhkan peningkatan pendapatan daerah melalui penentuan prioritas, terutama komoditi apakah dalam sektor pertanian terutama sub-sektor tanaman pangan yang mampu menjadi komoditi unggulan dan memiliki komparatif advantage.
2. pendapatan petani yang masih rendah terutama petani lahan sempit untuk itu diperlukan pengetahuan tentang barang komoditi apakah dalam sub-sektor pertanian tanaman pangan yang mempunyai kecenderungan untuk mempunyai daya saing yang kuat pada masa mendatang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

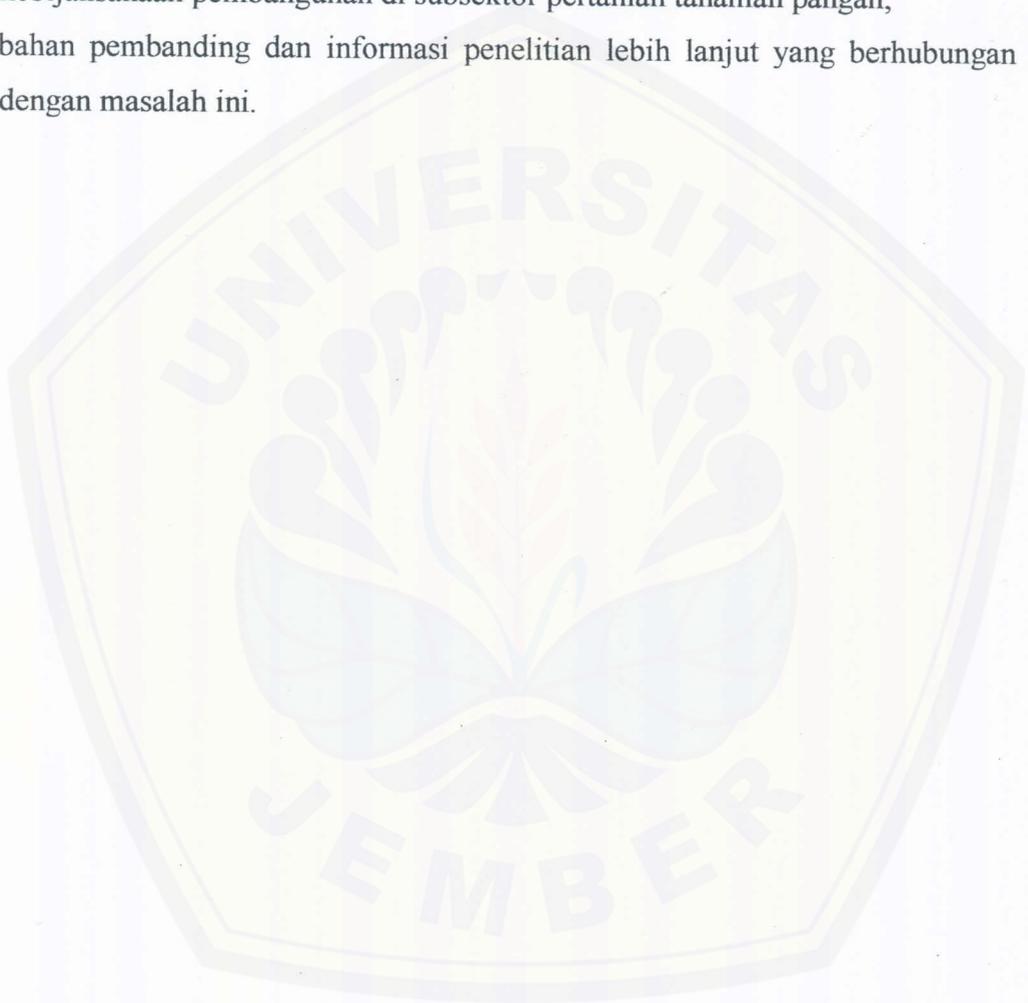
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. mencari gambaran tentang komoditi basis dan bukan basis pada sektor pertanian terutama sub-sektor tanaman pangan pada tahun 2001.
2. mencari gambaran tentang komoditi basis sub-sektor tanaman pangan yang mempunyai kecenderungan menguat didalam perekonomian di Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2001.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai:

1. bahan informasi tentang komoditi subsektor tanaman pangan yang lebih potensial untuk dikembangkan.
2. sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan di subsektor pertanian tanaman pangan;
3. bahan pembanding dan informasi penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan masalah ini.



II. TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Heru Putranto (1990), dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Jember Sebagai Bagian Dari Propinsi Jawa Timur : Studi Prioritas Sektor dan Komoditi Th 1986”, menguraikan tentang komoditi basis pada sektor pertanian di daerah Kabupaten Jember pada tahun 1986 yang perlu diprioritaskan. Pada komoditi yang dihasilkan sub-sektor tanaman pangan antara lain padi dan kedelai. Sub-sektor tanaman perkebunan rakyat antara lain tembakau dan pinang. Sub-sektor tanaman perkebunan besar antara lain kopi, kelapa, karet, dan coklat. Sub-sektor peternakan antara lain telur ayam kampung, kulit ternak sapi dan domba, susu ternak sapi dan daging unggas. Sub-sektor kehutanan antara lain kayu rimba, getah pinus, gondorukem dan terpentin. Sub-sektor perikanan antara lain perikanan laut, perikanan perairan umum, perikanan budi daya kolam dan perikanan budi daya keramba. Barang-barang komoditi yang diuraikan diatas merupakan komoditi yang memiliki keunggulan komparatif karena berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Heru Putranto dengan menggunakan alat analisis LQ maka barang-barang komoditi tersebut memiliki $LQ > 1$ (LQ lebih dari satu) dalam arti lain disebut komoditi basis. Dengan hasil data tersebut maka di daerah Kabupaten Jember pada tahun 1986 barang-barang komoditi tersebut perlu prioritas pengembangan dalam produktivitasnya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pembangunan Pertanian

Pembangunan ekonomi dengan peranan pada sektor pertanian adalah sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat dinegara-negara miskin menguntungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana bersungguh-sungguh dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota

masyarakatnya yang hidup disektor pertanian (Arsyad,1997:303). Cara ini bisa ditempuh dengan jalan meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka atau dengan menaikkan harga yaang mereka terima atas produk yang dihasilkan.

Sektor pertanian dapat merupakan sumber modal yang utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Modal berasal dari tabungan yang diinvestasikan dan tabungan yang berasal dari pendapatan. Di negara-negara paling miskin, pangsa pendapatan pertanian terhadap produk nasional mencapai 50%. Berarti separuh atau lebih dari produk nasional disumbangkan oleh sektor non pertanian, terutama industri dan perdagangan (jasa-jasa), dan sektor-sektor ini merupakan penyumbang penting bagi tabungan yang akhirnya digunakan untuk investasi. Namun demikian, bisa saja suatu negara mengalami tingkat pembentukan modal yang tinggi tanpa didorong oleh sektor pertanian sama sekali. Tahap-tahap pembangunan pertanian yaitu (Mosher,1966 : 16) :

1. pertanian tradisional yang produktifitasnya rendah.
2. tahap penganeka ragam produk pertanian sudah mulai terjadi dimana produk pertanian sudah ada yang dijual kesektor komersial, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah.
3. pertanian modern, produktifitasnya sangat tinggi disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi yang tinggi pula. Pada tahap ini produk pertanian seluruhnya ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersial.

Modernisasi pertanian tahap tradisional (subsistem) menuju pertanian modern membutuhkan banyak upaya lain selain pengaturan kembali struktur ekonomi pertanian atau penerapan teknologi pertanian yang baru.

2.2.2 Syarat-syarat Pembangunan Pertanian

Syarat-syarat pembangunan pertanian adalah dengan mengelompokkan syarat - syarat pembangunan tersebut menjadi dua yaitu syarat-syarat mutlak dan syarat - syarat pelancar. Ada lima pembangunan pertanian. Jika satu saja syarat-syarat tersebut tidak ada, maka terhentilah pembangunan pertanian. Pertanian bisa berjalan tetapi statis.

Syarat-syarat mutlak tersebut adalah (Mosher, 1966 : 17) :

1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani.

Pembangunan pertanian akan meningkatkan produk hasil-hasil usaha tani. Hasil-hasil ini tentunya akan dipasarkan dan dijual dengan harga yang cukup tinggi untuk menutupi biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan para petani sewaktu memproduksinya. Dalam memasarkan hasil-hasil produk pertanian ini diperlukan adanya permintaan (*demand*) akan hasil-hasil pertanian tersebut, sistem pemasaran dan kepercayaan para petani pada sistem pemasaran tersebut.

2. Teknologi yang senantiasa berkembang.

Teknologi pertanian berarti 'cara bertani'. Didalamnya termasuk cara-cara bagaimana para petani menebarkan benih, memelihara tanaman dan memungut hasil serta memelihara ternak. Termasuk pula didalamnya benih, pupuk, obat-obatan pemberantas hama, alat-alat dan sumber-sumber tenaga. Juga termasuk berbagai kombinasi jenis-jenis usaha oleh para petani agar dapat menggunakan tenaga dan tanah mereka sebaik mungkin.

4. Tersediannya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal.

Pembangunan pertanian memerlukan faktor bahan-bahan dan alat-alat produksi yang tersedia diberbagai tempat dalam jumlah yang cukup banyak dan memenuhi keperluan tiap petani.

5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

Diperlukan suatu jaringan pengangkutan yang bercabang luas dan membawa bahan-bahan perlengkapan produksi ke tiap usaha yang tani dan membawa hasil usaha tani ke konsumen ke kota-kota besar dan kecil.

Disamping kelima syarat mutlak itu, ada lima syarat lagi yang memperlancar pembangunan pertanian yang termasuk syarat-syarat atau sarana pelancar, yaitu (Mosher, 1966 : 18) :

1. Pendidikan pembangunan.

Pendidikan pembangunan disini dititikberatkan pada pendidikan non formal yaitu kursus, pelatihan, penyuluhan dan sebagainya. Pendidikan pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas petani.

2. Kredit Produksi.

Untuk meningkatkan produksi para petani harus lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul, obat pemberantas hama, pupuk dan alat-alat lainnya. Pengeluaran-pengeluaran seperti ini harus dibiayai dari tabungan atau dengan meminjam untuk jangka waktu antara saat bahan-bahan produksi dan peralatan itu dibeli dan saat hasil panen dapat dijual.

3. Kegiatan Gotong Royong Petani.

Kegiatan Gotong Royong ini dilakukan secara informal. Para petani bekerjasama dalam menanam atau memanen, saling membantu dan menanggulangi bencana yang menimpa mereka.

4. Perbaikan dan Perluasan Tanah Pertanian

Ada dua cara tambahan untuk mempercepat pembangunan pertanian yaitu ;

1. memperbaiki mutu tanah yang telah menjadi usaha tani, misalnya dengan pupuk, irigasi dan pengaturan pola tanam.
2. mengusahakan tanah baru, misalnya pembukaan petak-petak sawah baru (ekstensifikasi).

5 Perencanaan Nasional Pembangunan Pertanian.

Perencanaan pertanian adalah proses memutuskan apa yang hendak dilakukan pemerintah mengenai tiap kebijaksanaan dan kegiatan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu.

2.2.3 Sektor Pertanian dalam Proses Transformasi Struktural

Sejarah perekonomian memperlihatkan terjadinya pergeseran struktur dan sistem ekonomi suatu negara yang mengalami pembangunan , dari sifat agraris-tradisional menjadi industrial-modern.

Perubahan struktural ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Raharjo,1984 : 55) :

- a) sumbangan sektor pertanian secara relatif akan menurun, sedangkan sektor lain semakin besar peranannya dalam produksi nasional.
- b) mereka yang bekerja di sektor pertanian, secara absolut jumlahnya bisa saja

meningkat, namun persentasenya dalam jumlah lapangan kerja keseluruhan, akan menjadi kecil. Sebaliknya, bagian yang bekerja di sektor sektor lainnya akan meningkat.

- c) sifat produksi di semua bidang akan juga berubah sifatnya, yaitu menjadi lebih bersifat industrial. Produksi pertanian misalnya, akan makin banyak memakai sistem industri, yaitu hasil pertanian akan diproduksi secara besar-besaran atau berskala besar untuk dijual di pasar.
- d) pemanfaatan teknologi dalam manajemen modern. Dalam rangka meningkatkan produksi, dianjurkan pada para petani untuk mempergunakan teknologi modern, baik dalam proses penanaman maupun pengolahan hasil pertanian. Demikian pula dalam pemasaran hasil produksi pertanian melalui manajemen modern.

Proses perubahan struktur dan sistem perekonomian merupakan kodrat alam dari suatu negara yang berhasil melakukan pembangunan. Sistem perekonomian suatu negara yang berhasil melakukan pembangunan. Sistem perekonomian suatu negara merupakan satu kesatuan yang dicirikan oleh adanya hubungan sektor ekonomi yang satu dengan sektor ekonomi yang lain. Hubungan ini dapat dikatakan sebagai hubungan ketergantungan dan bahkan merupakan keterpaduan yang dinamis antara sektor ekonomi yang satu dengan sektor ekonomi yang lain. Dengan demikian, sektor pertanian tidak dapat dirancang dan dikembangkan sendiri tanpa memperhatikan sektor lain yang terkait dengan sektor pertanian tersebut. Di Indonesia, sektor pertanian ini erat hubungannya dengan sektor industri dan keduanya mempunyai ketergantungan yang erat.

Ada empat aspek hubungan antara sektor pertanian dan industri khususnya, jika dilihat dari transformasi sektor pertanian ke industri, yaitu (Soekartawi, 1989: 213) :

- a) pertanian itu semacam industri hulu. Interaksi antara sektor pertanian dan sektor lain (industri) akan semakin besar dengan berkembangnya industri hulu mengolah bahan baku hasil pertanian menjadi bahan jadi. Sebaliknya, sektor industri, sebagai produsen alat-alat pertanian merupakan industri hulu yang hasilnya dipergunakan di sektor pertanian.

- b) pertanian itu dapat bersaing dengan sektor lain dalam hal antara lain :
Pendayagunaan tenaga kerja , sumber daya alami dan modal.
- c) dengan argumentasi seperti dijelaskan dibutir a dan b maka perlu dirancang perkembangan ekonomi secara menyeluruh, terpadu, serasi, sehingga efek persaingan bisa dikurangi dan digantikan dengan hubungan komplementer atau saling menunjang.
- d) hubungan yang saling berkaitan tersebut menimbulkan suatu pemikiran bahwa suatu perencanaan pembangunan regional perlu mempertimbangkan azas keuntungan komperatif dan efisiensi, karena itu baik sektor pertanian maupun industri perlu dikembangkan satu sama lain sehingga keduanya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

Meskipun sektor pertanian dibangun secara besar-besaran, karena mendapat prioritas dalam mengalokasikan anggaran pembangunan, namun dalam proses pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, peranan relatif sektor ini tetap merosot, baik dilihat dari segi produksi maupun kesempatan kerja keseluruhan. Ini berarti bahwa produktifitas relatif sektor pertanian menjadi lebih kecil. Disamping itu, sebagai tenaga kerja yang tadinya atau seharusnya dibidang pertanianjuga tergeser ke sektor lain.

2.2.4 Pentingnya Perencanaan Didalam Pembangunan Pertanian.

Secara garis besar dan umum alasan-alasan perlunya suatu perencanaan adalah seperti dibawah ini (Tjokroamidjojo, 1987:9-11):

- a) dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu pengerahan kegiatan. Oleh karenanya disusun suatu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada tujuan pembangunan.
- b) dengan perencanaan dapat dilakukan suatu *forecesting* (perkiraan) terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan dan juga mengenai hambatan-hambatan yang akan dihadapi. Perencanaan mengusahakan agar ketidakpastian dapat dibatasi seminimal mungkin.
- c) perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif

tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.

- d) dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
- e) dengan perencanaan akan terdapat suatu alat ukur dan standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.

Dasar alasan perencanaan dari segi ekonomis adalah seperti di bawah ini:

- a) penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas secara lebih efisien dan efektif serta mengurangi atau menghindari pemborosan-pemborosan.
- b) kemungkinan untuk memperoleh hasil secara maksimal dari sumber-sumber yang tersedia, seperti meningkatnya produktivitas tenaga kerja, meningkatnya sumber-sumber alam, mendapatkan devisa dan lain-lain.
- c) mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus meningkat, supaya pendapatan perkapita masyarakat juga semakin meningkat.
- d) stabilitas ekonomi; menghadapi *siklus konjungtur*.

Mengingat harapan dan tuntutan yang semakin meningkat terutama di negara-negara yang sedang berkembang, dilain pihak kemampuan yang terbatas maka dilakukanlah perencanaan pembangunan ekonomi supaya taraf hidup masyarakat lebih cepat meningkat. Bagi negara-negara sedang berkembang, alasan-alasan lain yang perlu ditambahkan adalah:

- a) keyakinan ideologi politik, karena negara-negara yang sedang berkembang cenderung menganut falsafah masyarakat yang sosialis (intregalistis).
- b) belum sempurna atau melemahnya mekanisme pasar yang berakibat ketimpangan dalam mekanisme pasar, misalnya hubungan harga-harga yang mungkin tidak mendorong perkembangan ekonomi yang sehat.
- c) perubahan struktur ekonomi, sebab kebanyakan struktur ekonomi negara yang sedang berkembang berat sebelah yaitu berorientasi agraris, ekstratif yang dapat membawa kelemahan struktur tertentu. Baik dalam *inflexibilitas suply*

juga daya serap kesempatan kerja yang terbatas.

- d) tingkat investasi yang masih rendah, karena pendapatan juga masih rendah. Investasi merupakan variabel pokok dalam pemberian modal dan pertumbuhan ekonomi.
- e) belum berkembangnya kemampuan kewirausahaan dalam masyarakat, sehingga sedikit sekali peranan kegiatan produksi masyarakat yang dapat diharapkan untuk menunjang proses pembangunan negara.
- f) teknologi yang masih lemah. Teknologi juga merupakan variabel penting dalam proses pembangunan.
- g) penghematan ekonomis dalam sumber-sumber yang ada. Tingkah laku ekonomi rasional selalu berkenaan dengan alokasi sumber-sumber langka diantara penggunaan alternatif yang melatar belakangi *opportunity cost*, sehingga dapat dihindari suatu semangat yang bersifat pamer akibat pengaruh dari *demonstration effect*.
- h) mengatasi kekakuan-kekakuan yang merupakan sifat perekonomian yang terbelakang, yaitu bertujuan untuk memperluas pasar dan pembentukan harga yang lebih adil.

2.2.5 Arti dan Fungsi Perencanaan

Dari berbagai alasan tersebut, maka dikemukakan beberapa rumusan tentang perencanaan yang diharapkan akan menjelaskan arti dan fungsi suatu perencanaan seperti dibawah ini.

- a) perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- b) perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c) perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan bagaimana, kapan dan oleh siapa.
- d) Albert Waterson menyebutkan perencanaan pembangunan adalah melihat

kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan terus dengan terus mengikuti supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuannya.

- e) perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas, adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan efektif (Tjokroamidjojo,1987:12)

Milton Friedman mengatakan, bahwa perencanaan adalah terutama suatu cara berfikir mengenai persoalan-persoalan sosial ekonomi. Perencanaan adalah terutama berorientasi pada masa yang akan datang, sangat berkenaan dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijaksanaan dan program menyeluruh. Bilamana cara berfikir ini diterapkan, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan sedang dilaksanakan (Glasson, John.,1977:4).

Charles A.Merriam mengemukakan secara panjang lebar mengenai perencanaan. Menurutnya perencanaan adalah pengorganisasian usaha-usaha menggunakan kepandaian kemampuan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan nasional. Hal ini berdasarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan sumber-sumber, menghimpun dengan hati-hati melalui analisa-analisa, pandangan yang ada dengan faktor-faktor yang beraneka ragam yang harus dibawa bersama - sama supaya dapat menghindari pertentangan diantara kebijaksanaan-kebijaksanaan ataupun kekurangan pada himpunan pedoman-pedoman secara umum dengan melihat masa mendatang dan masa yang telah lalu. Para perencana melihat kedepan pada pemantauan kebijaksanaan jangka panjang dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang timbul (Tjokroamidjojo,1987:13)

Widjojo Nitisastro juga memberikan suatu gambaran secara global, bahwa perencanaan berusaha untuk mengubah salah satu atau beberapa faktor dalam suatu sistem yang diharapkan atau diyakini dapat menimbulkan rangkaian akibat yang mengubah faktor lainnya secara positif. Disamping itu perencanaan merupakan proyeksi untuk masa depan. Segala tindakan untuk tinjauan masa

depan jelas mempunyai hubungan yang erat dengan apa yang dimiliki sekarang. Tindakan itu didasari oleh pemikiran pragmatis rasional untuk suatu kurun waktu tertentu. Untuk melengkapi pengertian tentang fungsi perencanaan maka dikemukakan pemikiran Widjojo Nitisastro yang mengatakan, bahwa perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal:

Pertama, penentuan pikiran secara sadar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.

Kedua, adalah pemilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula (Tjokroamidjojo, 1987 :14).

2.2.6 Ciri - ciri dan Tujuan Perencanaan Pembangunan.

Ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, biasanya berkaitan pula dengan pemerintah sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*). Oleh karenanya perencanaan pembangunan umumnya dilakukan di negara-negara yang sedang berkembang, tergantung situasi dan kebutuhan masyarakatnya ciri-ciri dan tujuan-tujuan itu adalah :

- a) usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (*study social economic growth*). Dicerminkan dengan usaha peningkatan produksi nasional berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
- b) usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang cepat.
- c) usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi supaya tidak berat sebelah atau seimbang.
- d) usaha untuk menyediakan atau memperluas kesempatan kerja.
- e) usaha untuk mengadakan redistribusi pendapatan atau pembagian pendapatan supaya lebih merata.

- f) usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
- g) usaha untuk mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antara daerah satu dengan daerah yang lain.
- h) usaha sedemikian rupa agar kemampuan membangun secara bertahap lebih bertumpu pada kemampuan nasional.
- i) usaha secara terus menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- j) usaha pembangunan hal-hal yang bersifat fundamental atau ideal dan bersifat jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing ciri dan tujuan tersebut adalah penting, tetapi banyak kemungkinan akan bertentangan satu sama lain. Oleh karenanya didalam perencanaan perlu ditentukan tujuan mana yang harus didahulukan dan penentuan ini disesuaikan dengan keadaan negara (Tjokroamidjojo, 1987:49-52).

2.2.7 Perencanaan Pembangunan Sektoral.

Dalam perencanaan pembangunan sektoral biasanya diperlukan data dari masing-masing sektor yang digunakan untuk menghitung besar pendapatan nasional. Perhitungan tersebut didasarkan atas besarnya nilai tambah (*value added*) di tiap-tiap sektor. Pendapatan nasional dapat dirincikan menurut sektor-sektor produksi, kemudian ditetapkan sasaran dalam sektor-sektor dan subsektor yang berhubungan satu sama lain, maka sasaran dalam tingkat output masing-masing tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan sasaran sektor-sektor lainnya (Kadariah, 1985:31-32).

Perbedaan sektor-sektor tersebut dimaksudkan untuk membimbing perencana dalam menyusun rencana dapat terjadi keseimbangan dalam pembangunan perekonomian nasional. Hal ini berdasarkan faham bahwa tujuan rencana yang ideal adalah untuk menghindarkan adanya kapasitas produksi yang tidak bermanfaat, sekaligus meningkatkan permintaan terhadap produksi nasional yang berarti memperluas kapasitas sektor-sektor dimana produksi terakhir dihasilkan. Jika tambahan kapasitas produksi sudah diketahui, maka akan dapat dihitung perluasan seluruh kapasitas produksi yang dibutuhkan. Masalahnya masa

pembangunan yang dibutuhkan suatu sektor lebih lama dari masa pembangunan yang dibutuhkan dari suatu sektor lainnya. Dalam situasi ini, maka tugas yang harus dilakukan adalah usaha mensikronkan bagian-bagian dari suatu rencana (Siagian, 1989:58).

Apabila tidak ditetapkan dan dirumuskan kebijaksanaan dasar dan strategi pembangunan, penyusunan rencana menyeluruh (*aggregate*) dengan kerangka makro rencana dan perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka disusun program investasi dan sasaran-sasaran rencana bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan. Hal ini harus didukung secara serasi dengan kerangka kebijaksanaan pembangunan yang konsisten, serta kebijaksanaan pembangunan yang khusus mendukung pembangunan sektor-sektor tersebut. Sesuai dengan pilihan yang diambil sewaktu menetapkan kebijakan dasar pembangunan yang merencanakan program investasi dengan tekanan pada sektor pertanian ataupun sektor pengembangan industri atau juga sektor prasarana yang luas (*social overhead capital*). Yang dimaksudkan dengan investasi sektor prasarana yang luas adalah memberikan perhatian secara lebih efektif kepada usaha-usaha dibidang sosial yang mendukung kegiatan produktif seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, penelitian dan kegiatan yang lain (Tjokroamidjojo, 1987:89). Program investasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai susunan-susunan rencana masing-masing bidang atau sektor tersebut. Sudah barang tentu harus dipertimbangkan kemungkinan pencapaiannya, skala prioritas yang tajam, menunjang pertumbuhan serta hubungan yang serasi dan saling mendukung.

Program atau rencana investasi masing-masing bidang atau sektor terdiri dari berbagai program pembangunan, yang merupakan unit terkecil dan aktivitas-aktivitas investasi yang harus diperhitungkan dalam proses perencanaan. Penyusunan secara teliti dikaitkan dengan penetapan sasaran-sasaran (*target setting*) dari pada rencana bidang atau sektor (Tjokroamidjojo, 1987:91). Dalam setiap rencana pembangunan harus ditentukan target-target produksi.

Target-target produksi ini yang dipakai sebagai pedoman untuk seleksi proyek. Dengan demikian proyek-proyek yang dipilih akan selalu sesuai dengan prioritas nasional. Pembangunan masing-masing sektor pembangunan perlu pula

diperkirakan, disamping perkiraan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bahkan sering pula dilakukan penekanan disatu sektor tertentu daripada sektor lain, karena diinginkan atau direncanakan suatu perubahan struktur ekonomi. Hal ini diusahakan dengan meningkatkan laju pertumbuhan sektor tertentu dan secara relatif pengurangannya pada sektor yang lain, seperti perencanaan untuk mendapatkan keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri. Disini perlu dipertimbangkan “*trade off*” yang berarti keuntungan penekanan disatu sektor mungkin akan merugikan sektor lainnya. Hal ini menyangkut juga penekanan yang dilakukan pada sektor ekonomi ataupun sektor non ekonomi. Jika diambil kombinasinya, maka harus dicari keseimbangannya yang serasi dan saling menunjang. (Tjokroamidjojo, 1987:93).

Sektor-sektor dalam perekonomian mempunyai laju pertumbuhan yang berbeda-beda, karena itu proses pembangunan ekonomi membawa serta perubahan struktur ekonomi. Umpamanya sektor pertanian tidak bisa berkembang dengan cepat karena terdapatnya permintaan terhadap hasil sektor pertanian naiknya lambat, produktivitas perjamnya rendah, tingkat hidup petani yang rendah dan terdapatnya pengangguran tak kentara. Untuk menaikkan pendapatan nasional dengan cepat, diperlukan pergeseran sumber-sumber dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa yang bisa berkembang dengan cepat (Siagian, 1989:57).

Hubungan antara sektor pertanian dan sektor industri terbatas sekali. Dibanyak negara, sektor pertanian bukan merupakan pasar bagi sektor industri dan sebaliknya, industri menghisap sebagian besar dari sektor pertanian. Modal kewiraswastaan tidak mudah mengalir atau bergeser dari suatu sektor ke sektor yang lain. Sehingga pangkal tolak bagi perencanaan pembangunan sektoral dapat dianggap sebagai tertentu (*given*) dengan adanya kenaikan penduduk disektor pertanian. Berdasarkan hal itu diadakan perkiraan (*estimate*) tentang keperluan untuk menyerap kenaikan penduduk disektor pertanian ke sektor industri.

Pembangunan akan membawa serta perubahan ke dalam struktur perekonomian, artinya sektor industri secara relatif peranannya akan menjadi lebih besar. Oleh karena alternatif yang dipakai agar sektor pertanian tetap memproduksi bahan mentah bagi industri. Keseimbangan permintaan dan

penawaran hasil pertanian perlu dipertahankan dalam perencanaan. Sedangkan dalam proses industrialisasi, sektor industri mempunyai fungsi untuk memproduksi keperluan konsumsi masa sekarang dan sektor pertanian maupun sektor industri, serta memproduksi untuk keperluan investasi dan barang-barang modal, juga untuk kedua sektor tersebut. Dengan adanya pengembangan industri, prasarana-prasarana yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk mengurangi kelebihan kapasitas prasarana-prasarana yang ada sebelumnya, seperti pemanfaatan listrik, jalan-jalan, jembatan-jembatan, jaringan pengangkutan dan sebagainya (Kadariah, 1985:13-14).

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian sebelumnya dan landasan teori yang ada maka dapat ditarik dugaan sebagai berikut :

1. diduga dalam pertumbuhan subsektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Malang pada tahun 2001 yang dikategorikan subsektor basis, beberapa komoditi yang menyumbang total produksi tersebut tidak semuanya dikatakan komoditi basis.
2. diduga dalam perkembangan kedepan tidak semua produk komoditi basis pada subsektor tanaman pangan akan mengalami pertumbuhan peningkatan sumbangan produksi yang positif atau menguat untuk lebih diprioritaskan dalam peningkatan pembangunan pada diwilayah Kabupaten Malang

III. Metode Penelitian



3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatori bersifat ex post facto, artinya data yang dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan telah berlangsung (lewat), dan juga mempelajari fenomena - fenomena yang terjadi.

3.1.2 Unit penelitian

Sebagian fokus penulisan yakni analisa dalam penulisan ini adalah data Produksi Domestik Regional Bruto tahun 1997-2001, yang dalam hal ini lebih di fokuskan pada produksi komoditi subsektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Malang pada tahun 2001

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data time series dan data sekunder yang dikumpulkan secara langsung dengan melakukan pencatatan data dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertanian Sub – Sektor Tanaman Pangan dan Kantor Badan Statistik Kabupaten Malang.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Metode Location Quotient (LQ)

Untuk mengetahui gambaran tentang komoditi basis dan non basis digunakan metode location Quotient (LQ) yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan relatif dengan rumus sebagai berikut (Azis, I.J: 1994:54):

$$LQ = R_2 = \frac{Si/Ni}{S/N}$$

dimana :

S_i = jumlah produksi komoditi i dalam sub-sektor tanaman pangan di Kabupaten Malang (ton).

N_i = jumlah produksi komoditi i dalam sub-sektor di Propinsi Jawa Timur (ton).

S = jumlah produksi komoditi keseluruhan dalam sub-sektor di Kabupaten Malang (ton).

N = jumlah produksi komoditi keseluruhan dalam sektor di Propinsi Jawa Timur (ton).

Kriteria yang dipakai :

- ❖ jika $LQ > 1$, maka menyatakan komoditi i tersebut memiliki keunggulan komparatif atau di kategorikan sebagai komoditi basis, yaitu komoditi yang di prioritaskan di Pemerintah Kabupaten Malang.
- ❖ Jika $LQ < 1$, maka menyatakan komoditi i tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif atau komoditi bukan basis yaitu komoditi yang kurang diprioritaskan di Pemerintahan Kabupaten Malang.
- ❖ Jika $LQ = 1$, maka menyatakan komoditi i tersebut mencukupi kebutuhan (swasembada) di daerah Kabupaten Malang.

Untuk mengetahui gambaran tentang sektor basis dan non basis digunakan metode location Quient (LQ) yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan relatif dengan rumus sebagai berikut (Azis, I, J.,: 1994:54):

$$LQ = R_1 = \frac{S_i/N_i}{S/N}$$

dimana :

S_i = jumlah produksi sub-sektor i dalam sektor di Kabupaten Malang (ton).

N_i = jumlah produksi sub-sektor i dalam sektor di Propinsi Jawa Timur (ton).

S = jumlah produksi sub-sektor keseluruhan dalam sektor di Kabupaten Malang (ton).

N = jumlah produksi sub-sektor keseluruhan dalam sektor di Propinsi Jawa Timur (ton).

Kriteria yang dipakai :

- jika $LQ > 1$, maka menyatakan sub-sektor i tersebut memiliki keunggulan komparatif atau di kategorikan sebagai sub-sektor basis, yaitu kelompok komoditi yang di prioritaskan di Pemerintah Kabupaten Malang.
- jika $LQ < 1$, maka menyatakan sub-sektor i tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif atau kelompok komoditi bukan basis yaitu kelompok komoditi yang kurang diprioritaskan di Pemerintahan Kabupaten Malang.
- jika $LQ = 1$, maka menyatakan sub-sektor i tersebut mencukupi kebutuhan (swasembada) di daerah Kabupaten Malang.

Pada hakekatnya Rumus LQ tersebut didasarkan pada asumsi:

- a) bahwa penduduk disetiap daerah mempunyai pola permintaan yang sesuai dengan pola permintaan nasional.
- b) bahwa permintaan daerah akan sesuatu barang pertama-tama dipenuhi dengan hasil daerah itu sendiri dan jika jumlah yang diminta melebihi jumlah produksi daerah ini, baru kekurangannya diimpor dari luar daerah tersebut.

Berdasarkan asumsi ini, tehnik penggunaan LQ mempunyai kelemahan, yaitu (Arsyad; 1997:317) :

- a) selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat adalah berlainan baik antar daerah maupun dalam suatu daerah.
- b) tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang, untuk setiap jenis daerah berbeda, artinya produksi rata-rata komoditi X daerah A lebih besar dari 1 (satu) tetapi daerah A mengimpor komoditi X , sedangkan daerah B yang LQ komoditi X lebih kecil dari 1 (satu) namun dapat mengekspor komoditi X .

3.3.2 Metode Koefisien Pergeseran (CR)

Untuk mengetahui komoditi yang patut diprioritaskan digunakan analisis koefisien pergeseran (CR) yaitu tentang komoditi yang berkecenderungan melemah atau menguat dari perbandingan LQ yang kedua (R_2) yang menyatakan pergeseran dalam distribusi lokasinya.

$$CR = \frac{\%(S_{i_2}/N_{i_2} - S_{i_1}/N_{i_1}) - \%(S_2/N_2 - S_1/N_1)}{100}$$

S_{i_1} = jumlah produksi komoditi I dalam sub-sektor tanaman pangan di Kabupaten Malang pada tahun pertama (ton).

N_{i_1} = jumlah produksi komoditi I dalam sub-sektor tanaman pangan di Daerah Jawa Timur pada tahun pertama (ton).

S_{i_2} = jumlah produksi komoditi I dalam sub-sektor tanaman pangan di Kabupaten Malang pada tahun kedua (ton).

N_{i_2} = jumlah produksi komoditi I dalam sub-sektor tanaman pangan di Jawa Timur pada tahun kedua (ton).

S_1 = jumlah produksi komoditi keseluruhan dalam sub-sektor tanaman pangan di Kabupaten Malang pada tahun pertama (ton).

N_1 = jumlah produksi komoditi keseluruhan dalam sub-sektor tanaman pangan di Daerah Jawa Timur pada tahun pertama (ton).

S_2 = jumlah produksi komoditi keseluruhan dalam sub-sektor tanaman pangan di Kabupaten Malang dalam tahun kedua (ton).

N_2 = jumlah produksi komoditi I dalam sub-sektor tanaman pangan di Daerah Jawa Timur pada tahun kedua (ton).

Kriteria yang digunakan :

CR = negatif, berarti komoditi tersebut melemah.

CR = 0, berarti komoditi tersebut tidak ada pergeseran (distribusi tetap).

CR = positif, berarti komoditi tersebut menguat.

CR = 1, berarti komoditi tersebut terjadi pergeseran mutlak.

3.4 Definisi Variabel yang Dioperasikan Dalam Penelitian

Pada bagian ini diberikan batasan-batasan supaya tidak terjadi pembiasan pengertian dan masalah yang dibahas, sehingga arti dan tujuan penelitian dapat diterima. Batasan-batasan tersebut antara lain:

1. komoditi adalah barang – barang atau jasa yang diproduksi pada suatu daerah, dalam penelitian ini dikhususkan pada komoditi sub - sektor tanaman pangan

dimana menurut PDsRB yaitu padi, jagung, ubi kayu, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau dalam satuan ton.

2. variabel – variabel yang dianalisis guna menentukan prioritas komoditi dan kecenderungan menguat secara positif pada tahun 1997 – tahun 2001 adalah data PDsRB sub – sektor tanaman pangan (nilai tambah/value added) dalam satuan ton.





IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Potensi Ekonomi Kabupaten Malang

4.1.1 Tinjauan Ekonomi Kabupaten Malang

Perkembangan produktivitas secara riil pada Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang tahun 2000 sebesar Rp 7.425.635 (dalam juta) ada kenaikan 1,13% dari tahun 1999. Apabila dilihat secara parsial untuk masing-masing sektor ekonomi adalah sebagai berikut :

| | |
|---|--------|
| Sektor pertanian sebesar..... | 31,89% |
| Sektor pertambangan dan penggalian sebesar..... | 0,65% |
| Sektor industri pengolahan..... | 13,65% |
| Sektor listrik, gas, dan air minum | 1,44% |
| Sektor bangunan..... | 1,94% |
| Sektor perdagangan, hotel dan restoran | 22,62% |
| Sektor pengangkutan dan komunikasi | 7,78% |
| Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan..... | 5,74% |
| Sektor jasa-jasa..... | 14,29% |

Struktur perekonomian dapat dilihat sektor pertanian peranannya masih cukup dominan yaitu sebesar 31,89%. Hal ini Kabupaten Malang telah mampu melakukan perubahan-perubahan dalam volume produksi. Dimana produksi riilnya senilai Rp 2.368.582 (dalam juta) dengan pertumbuhan sebesar 8,57% yang diikuti dengan adanya perubahan dalam tingkat harga dengan inflasi sektor pertanian – 2,36%. Peranan sektor pertanian dari tahun 1999 ke tahun 2000 mengalami sedikit kenaikan, sementara sektor industri peranannya sedikit menurun 1,53% dengan laju pertumbuhan 8,4 % sedangkan perkembangan sektor perdagangan peranannya pada tahun 2000 cukup besar yaitu 22,62%.

4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2000 adalah

sebesar 4,01% telah didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,62% yang diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 14,29%. Sedangkan fluktuasi harga (inflasi) yang terjadi pada tahun yang sama sebesar -2,36%. Nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas ekonomi sebesar Rp1.160.158,49 dengan masing-masing pendapatan yang diterima sebagai akibat dari keikutsertaannya dalam proses ekonomi (income perkapita) sebesar Rp 1.252.609,28 dengan tingkat pertumbuhan 4.01%.

Peranan sektor primer, sekunder dan tersier atas harga berlaku dari tahun 1998 masing-masing sebesar 31,41%; 16,58% dan 52,01% dan tahun 1999 masing-masing sebesar 31,01; 16,66 dan 52,33 dan tahun 2000 masing-masing sebesar 30,13; 17,04 dan 52,83. Memperhatikan angka dari tahun 1998 ke tahun 2000 sektor primer selalu menurun, sektor sekunder sedikit mengalami penurunan dan tersier dari tahun 1998 ke tahun 2000 selalu naik. Gambaran-gambaran ini dapat menunjukkan rencana pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah seperti tertuang didalam GBHN.

Untuk peranan sektoral (PDRB) Kabupaten Malang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 1998,1999 dan 2000 secara terperinci dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Peranan Sektoral (PDRB) Kabupaten Malang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1998-2000 (dalam persen)

| Lapangan Usaha/Sektor | Tahun | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| | 1998 | 1999 | 2000 |
| Pertanian | 36,54 | 35,17 | 31,88 |
| Pertambangan & penggalian | 0,71 | 0,73 | 0,65 |
| Industri pengolahan | 15,27 | 15,18 | 13,65 |
| Listrik, gas dan air minum | 1,09 | 1,28 | 1,44 |
| Konstruksi | 1,68 | 1,66 | 1,94 |
| Perdagangan,hotel dan restoran | 21,97 | 22,43 | 22,62 |
| Pengangkutan dan komunikasi | 7,40 | 6,97 | 7,78 |
| Keuangan,persewaan dan jasa | 5,75 | 4,13 | 5,74 |
| Jasa-jasa | 13,18 | 12,44 | 14,29 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100 | 100 | 100 |

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang,2001

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor pertanian masih mendominasi kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Malang, namun peranan tersebut dari tahun 1998 ke tahun 2000 terus mengalami penurunan. Sektor kedua terbesar sumbangannya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan peranannya dari tahun 1998 ke tahun 2000 sedikit mengalami kenaikan. Sektor ketiga terbesar sumbangannya adalah sektor jasa-jasa dan peranannya dari tahun 1998 ke tahun 2000 berfluktuasi.

4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Perkembangan riil Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan merupakan indikator terhadap perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Malang tahun 1998 sebesar Rp 2.636.631 (dalam juta) tahun 1999 Rp 2.705.426 (dalam juta), dan tahun 2000 Rp 2.786.505 (dalam juta). Produk Domestik Regional Bruto untuk masing-masing sektor tahun 1998, 1999 dan tahun 2000 secara terperinci disajikan dalam tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 : Peranan Sektoral (PDRB) Kabupaten Malang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1998-2000 (dalam juta rupiah)

| Lapangan Usaha/Sektor | Tahun | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | 1998 | 1999 | 2000 |
| Pertanian | 817997,29 | 846031,5 | 812228,81 |
| Pertambangan & penggalian | 18132,17 | 18152,12 | 18127,17 |
| Industri pengolahan | 371432,89 | 376421,30 | 372435,71 |
| Listrik, gas dan air minum | 49052,8 | 50829,87 | 53429,12 |
| Konstruksi | 44883,61 | 44736,95 | 49376,82 |
| Perdagangan, hotel dan restoran | 592696,36 | 612352,44 | 617726,45 |
| Pengangkutan dan komunikasi | 223808,67 | 234325,59 | 343808,67 |
| Kuangan, persewaan dan jasa | 129616,29 | 132623,6 | 173041,69 |
| Jasa-jasa | 389554,47 | 397954,45 | 454925,24 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 2824638,81 | 2634123,9 | 2786505 |

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2001

Dari tabel diatas terlihat bahwa sektor pertanian mengalami fluktuasi selama dua tahun terakhir. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh dengan

rata-rata 128,89%, sektor industri pengolahan tumbuh rata-rata 129,97%, sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh rata-rata 193,23%, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh rata-rata 124,6%, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh rata-rata 135,20%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh rata-rata 97,55%, dan sektor jasa-jasa tumbuh rata-rata 120,72%, serta sektor konstruksi tumbuh rata-rata 111,96%.

4.2 Penentuan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang

Untuk mengetahui prioritas pembangunan sub-sektor tanaman pangan di Pemerintahan Kabupaten Malang digunakan data Produk Domestik sub Regional Bruto berdasarkan harga berlaku dan harga tetap tahun 1993.

Pendekatan yang digunakan dengan metode LQ, dirumuskan dalam bentuk:

$$LQ = R_i = \frac{S_i / N_i}{S / N}$$

Secara teoritis sub-sektor PDsRB yaitu sub-sektor tanaman pangan dapat dibedakan atas basis dan non basis,

4.2.1 Keunggulan Komparatif PDsRB Sub-Sektor Tanaman Pangan Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 1997 – 2000.

Dalam menentukan keunggulan komparatif PDsRB sub-sektor tanaman pangan berdasarkan harga berlaku di Pemerintahan Kabupaten Malang dengan metode LQ dari tahun 1997 – tahun 2000 ditunjukkan dalam tabel 3.

Tabel 3: Hasil Perhitungan LQ PDsRB Sub – Sektor Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Malang Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 1997 – 2000.

| Keterangan | Tahun | Location Quotient |
|---------------------------|-------|-------------------|
| Sub-sektor Tanaman Pangan | 1997 | 1,21 |
| Sub-sektor Tanaman Pangan | 1998 | 1,21 |
| Sub-sektor Tanaman Pangan | 1999 | 1,24 |
| Sub-sektor Tanaman Pangan | 2000 | 1,22 |

Sumber : Lampiran 1b diolah.

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa keunggulan komparatif PDsRB sub – sektor tanaman pangan di Pemerintahan Kabupaten Malang berdasarkan harga

berlaku tahun 1997 – tahun 2000 adalah sub-sektor yang mampu menjadi andalan bagi Pemerintah Kabupaten Malang karena $LQ > 1$ maka dinyatakan sebagai sektor basis.

4.2.2 Keunggulan Komparatif PDsRB Sub-Sektor Tanaman Pangan Berdasarkan Harga Konstan tahun 1993 antara tahun 1997 – 2000.

Penentuan keunggulan komparatif PDsRB Sub – Sektor Tanaman Pangan berdasarkan harga konstan tahun 1993 antara tahun 1997 – 2000 dengan menggunakan metode LQ ditunjukkan oleh tabel 4.

Tabel 4: Hasil Perhitungan LQ PDsRB Sub – Sektor Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Malang Berdasarkan Harga Konstan 1993; Tahun 1997 – 2000.

| Keterangan | Tahun | Location Quotient |
|---------------------------|-------|-------------------|
| Sub-sektor Tanaman Pangan | 1997 | 1,16 |
| Sub-sektor Tanaman Pangan | 1998 | 1,13 |
| Sub-sektor Tanaman Pangan | 1999 | 1,13 |
| Sub-sektor Tanaman Pangan | 2000 | 1,11 |

Sumber : lampiran 2b diolah.

Tabel 4 menunjukkan bahwa keunggulan komparatif PDsRB sub-sektor tanaman pangan di Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan harga konstan 1993 antara tahun 1997 – 2000 adalah sub-sektor yang mampu menjadi andalan bagi Pemerintah Kabupaten Malang karena $LQ > 1$ maka dinyatakan sebagai sektor basis.

4.3 Analisis Penentuan Prioritas Pengembangan Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 1997 – 2001.

Prioritas pengembangan komoditi – komoditi terutama sub- sektor tanaman pangan antara tahun 1997 – 2001 dapat diketahui dengan menggunakan data produksi per-komoditi di daerah Pemerintah Kabupaten Malang dengan data produksi komoditi total seluruh wilayah Pemerintah Daerah Jawa Timur. Data tersebut merupakan produksi komoditi-komoditi yang dihasilkan pada tahun 1997 – 2000 khusus sub – sektor tanaman pangan (padi dan Palawija). Data tersebut dapat dilihat pada lampiran-lampiran 3,4,5,6, dan 7.

Penentuan Prioritas pengembangan komoditi – komoditi menggunakan metode LQ yang membandingkan besar produksi sub-sektor tanaman pangan di Pemerintah Kabupaten Malang dibandingkan besarnya produksi komoditi-komoditi di Pemerintah Daerah Jawa Timur. Hal itu dimaksudkan agar pada nantinya komoditi-komoditi yang memiliki keunggulan komparatif di Pemerintah Kabupaten Malang dapat diprioritaskan pengembangannya untuk pembangunan perekonomian Pemerintah Kabupaten Malang di masa-masa mendatang.

Dalam menentukan prioritas pengembangan komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan yang dihasilkan di Pemerintah Kabupaten Malang digunakan data produksi komoditi – komoditi baik di Pemerintah Kabupaten Malang maupun di Pemerintah Daerah Jawa Timur. Data tersebut dihitung dengan metode LQ dari perhitungan (angka banding) yang kedua (R_2), yaitu;

$$LQ = R_2 = \frac{Si/Ni}{S/N}$$

Dengan menggunakan data produksi komoditi dalam satu tahun yang dihasilkan baik di daerah Kabupaten Malang dan total seluruh daerah di wilayah Jawa Timur. Dari metode dan data tersebut maka diperoleh hasil yang ditunjukkan oleh tabel 5.

Tabel 5: Hasil Perhitungan LQ Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 1997 - 2001.

| Komoditi | Location Quotient | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|------|-------|
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Padi (sawah & ladang) | 0,67 | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 0,52 |
| Jagung | 1,1 | 0,98 | 1,16 | 1,25 | 1,02 |
| Ubi Kayu | 1,77 | 1,17 | 1,78 | 1,58 | 2,12 |
| Ubi Jalar | 2,03 | 2,33 | 3,07 | 3,55 | 3,65 |
| Kacang Tanah | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,34 |
| Kedelai | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,12 |
| Kacang Hijau | 0,12 | 0,006 | 0,009 | 0,02 | 0,007 |

Sumber : lampiran 3b, 4b, 5b, 6b dan 7b data diolah.

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa pada tahun 1997 komoditi yang memiliki ($LQ > 1$) atau dianggap komoditi basis antara lain komoditi jagung sebesar 1,1, ubi kayu sebesar 1,77, dan ubi jalar sebesar 2,03. Sedangkan komoditi yang lain $LQ < 1$ atau disebut komoditi non basis. Pada tahun 1998 komoditi basisnya antara lain komoditi ubi kayu sebesar 1,17, dan ubi jalar sebesar 2,33. Jika dibandingkan dengan tahun 1997 telah terjadi pergeseran dimana komoditi jagung tidak lagi memiliki keunggulan komparatif pada tahun 1998, sebab nilai LQ komoditi jagung turun sebesar 0,98. Hal ini dipengaruhi oleh; 1. peningkatan produksi komoditi jagung yang lebih besar di daerah lain dibandingkan peningkatan produksi komoditi jagung di Kabupaten Malang; 2. total jumlah produksi jagung daerah propinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan yang sangat besar (lampiran 3a dan 4a). Pada tahun 1999 komoditi jagung daerah Kabupaten Malang mengalami peningkatan kembali nilai Lq nya sebesar 1,16 dibanding tahun 1998. Hal ini dikarenakan; 1. produksi komoditi jagung mengalami penurunan di daerah lain sedangkan produksi komoditi jagung di Kabupaten Malang masih mengalami peningkatan; 2. total jumlah produksi komoditi jagung di propinsi Jawa Timur mengalami penurunan (lampiran 4a dan 5a). Selain itu beberapa komoditi basis yang lain pada tahun 1999 antara lain komoditi ubi kayu sebesar 1,78 dan komoditi ubi jalar sebesar 3,07. Pada tahun 2000 komoditi basis subsektor tanaman pangan daerah Kabupaten Malang antara lain; komoditi jagung sebesar 1,25 ; komoditi ubi kayu sebesar 1,58 dan komoditi ubi jalar sebesar 3,55. Pada tahun 2001 komoditi basis subsektor tanaman pangan di Kabupaten Malang antara lain komoditi jagung sebesar 1,02; komoditi ubi kayu sebesar 2,12 dan komoditi ubi jalar sebesar 3,65. Selain beberapa komoditi basis tersebut ada beberapa komoditi non basis yang lain $LQ < 1$ atau disebut komoditi non basis di Kabupaten Malang dan perkembangannya dalam memberi sumbangan produksi ke propinsi Jawa Timur tidak terlalu besar. Komoditi non basis sub-sektor tanaman pangan di Kabupaten Malang antara lain meliputi komoditi padi, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.

4.4 Analisis Tingkat Pergeseran Komoditi-Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan di Pemerintah Kabupaten Malang 1997-1999 dan 1999-2001.

Koefisien pergeseran komoditi amat berguna untuk mengetahui apakah suatu komoditi terutama komoditi yang memiliki keunggulan komparatif atau komoditi basis tingkat efisiensinya cenderung menguat atau melemah. Secara relatif selama beberapa tahun berjalan. Untuk mengetahui besarnya koefisien pergeseran dipergunakan data dalam bentuk yang sama pada tahun 1997 yang dibandingkan dengan data tahun 1999 dan data tahun 1999 dibandingkan dengan data tahun 2001. Koefisien pergeseran dirumuskan sebagai berikut:

$$CR = \frac{\%(S_i/N_{i_2} - S_i/N_{i_1}) - \%(S/N_2 - S/N_1)}{100}$$

1. Perhitungan Koefisien Pergeseran Komoditi tahun 1997 – 1999 dan tahun 1999-2001 dalam tabel 6.

Tabel 6: Hasil Perhitungan CR Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Malang Th 1997-1999 dan Th 1999-2001.

| Komoditi | CR 97-99 | CR 99-01 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Padi (sawah & ladang) | - 0,0005032 | - 0,00007395 |
| Jagung | - 0.015572 | - 0.00009602 |
| Ubi Kayu | 0,00004889 | 0,00025743 |
| Ubi Jalar | 0,00077606 | 0,00045156 |
| Kacang Tanah | - 0,0000038 | - 0,00000226 |
| Kedelai | - 0,00006695 | - 0,0000179 |
| Kacang Hijau | - 0,00012765 | - 0,00001871 |

Sumber : lampiran 8 dan 9 diolah.

Tabel 6 dapat diketahui untuk pergeseran koefisien positif pada tahun 1999 terdapat pada komoditi jagung (CR = 0,00004612), komoditi ubi kayu (CR = 0,00004889), dan komoditi ubi jalar (CR = 0,00077606) artinya bahwa ketiga komoditi tersebut memiliki keunggulan komparatif dan semakin efisien dalam produksinya. Pada tahun 2001 dapat diketahui untuk pergeseran koefisien positif terdapat pada komoditi komoditi ubi kayu (CR = 0,00025743) dan komoditi ubi jalar (CR = 0,00045156) artinya bahwa kedua komoditi tersebut memiliki keunggulan komparatif dan semakin efisien juga dalam produksinya.

4.5 Pembahasan

Dilihat secara keseluruhan komoditi basis mengalami fluktuasi nilai. Penyebab fluktuasi ini dikarenakan:

1. fluktuasi jumlah produksi komoditi i.
 - Jika jumlah produksi komoditi i di daerah Kabupaten Malang meningkat dan jumlah produksi komoditi i di daerah propinsi Jawa Timur menurun maka nilai komoditi basis komoditi i tersebut akan meningkat.
 - Jika jumlah produksi komoditi i di daerah Kabupaten Malang menurun sedangkan jumlah produksi komoditi I di propinsi Jawa Timur meningkat maka nilai komoditi basis komoditi I tersebut akan turun.
2. fluktuasi jumlah total seluruh komoditi sub-sektor tanaman pangan baik di daerah Kabupaten Malang dan propinsi Jawa Timur. Perubahan jumlah total seluruh komoditi akan berpengaruh dikarenakan masing-masing merupakan nilai pembagi komoditi i sub-sektor tanaman pangan. Semakin besar nilai pembaginya dibanding jumlah peningkatan produksi komoditi i tersebut maka nilai komoditi basisnya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya jika peningkatan jumlah produksi komoditi i tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah total seluruh komoditi sub-sektor tanaman pangan maka nilai komoditi basisnya akan semakin besar.

Penentuan prioritas pengembangan komoditi basis sub-sektor tanaman pangan akan dapat berjalan apabila pemerintah dapat mengambil kebijakan dan kegiatan yang mempengaruhi pembangunan pertanian dalam jangka waktu tertentu (Mosher, 1966:18). Dengan adanya pengetahuan tentang komoditi basis di daerah masing-masing maka efek persaingan bisa dikurangi dan digantikan dengan hubungan komplementer atau saling menunjang (Soekartawi,1989:21). Hal ini dikarenakan sifat produksi di semua bidang akan bersifat industrial, artinya hasil produksi pertanian akan diproduksi secara besar-besaran atau berskala besar untuk di jual ke pasar (Raharjo, 1984:55). Hasil dari analisis menunjukkan bahwa komoditi basis dapat dikembangkan lebih jauh sehingga petani kemungkinan dapat memperoleh hasil secara maksimal dari produksi yang memiliki daya saing di pasar (Tjokroamidjojo 1987:9).

Dengan membandingkan hasil analisis dengan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan pula pada bab II, menurut Heru Putranto (1990) bahwa dengan menggunakan alat analisis LQ maka daerah Kabupaten Jember memiliki komoditi basis pada sub-sektor tanaman pangan terhadap Propinsi Jawa Timur antara lain padi dan kedelai. Sedangkan hasil analisis data juga menggunakan alat analisis LQ pada penulisan ini didaerah Kabupaten Malang untuk jenis komoditi basis sub-sektor tanaman pangan terhadap Propinsi Jawa Timur antara lain jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Jika kondisi pertumbuhan jenis komoditi basis didaerah Kabupaten Jember saat ini masih sama dengan keadaan pada saat penelitian yang dilakukan oleh Heru Putranto maka dapat diandaikan pula bahwa daerah Kabupaten Jember dapat “mengekspor” produk komoditi basisnya yaitu padi dan kedelai ke daerah Kabupaten Malang. Daerah Kabupaten Malang sendiri juga akan “mengekspor” produk komoditi basisnya berupa jagung, ubi kayu, dan ubi jalar ke daerah Kabupaten Jember.

V. KESIMPULAN DAN SARAN



5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan masing-masing komoditi pada sub-sektor tanaman pangan di Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2001, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. komoditi yang dihasilkan dalam sub-sektor tanaman pangan di Kabupaten Malang tidak semuanya merupakan komoditi basis hal ini dapat dilihat dengan hasil komoditi yang memiliki LQ lebih besar dari pada satu hanya pada komoditi jagung sebesar 1,02, ubi kayu sebesar 2,12, dan ubi jalar sebesar 3,65. Sedangkan padi baik itu tanah kering atau ladang dan sawah, kacang tanah, kedelai, kacang hijau memiliki LQ kurang dari satu atau disebut komoditi bukan basis.
2. komoditi yang memiliki koefisien pergeseran positif dari ketiga komoditi basis diatas hanya ada pada komoditi ubi kayu ($CR = 0,00025743$), dan ubi jalar ($CR = 0,00045156$) artinya bahwa komoditi tersebut memiliki kecenderungan menguat untuk diprioritaskan dalam pembangunan diwilayah Kabupaten Malang.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang ada, maka saran yang harus dilaksanakan dan dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang terkhusus pada instansi-instansi yang terkait adalah:

1. Hendaknya secara konsisten dan berkesinambungan dalam menentukan prioritas pembangunan secara sub-sektoral perlu dipertimbangkan dengan indikator sub-sektor dan barang komoditi basis serta sub-sektor dan komoditi bukan basis untuk menentukan kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang.
2. Bagi komoditi yang cenderung tertinggal perkembangannya hendaknya dipertimbangkan kebijakan-kebijakan yang perlu untuk dapat meningkatkan perkembangan bagi komoditi-komoditi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L., 1997. **Ekonomi Pembangunan**. Yogyakarta; STIE YKPN.
- Azis, I. J., 1994. **Ekonomi Regional**. Jakarta; FE - UI.
- Badan Pusat Statistik. 1999. **Kabupaten Malang Dalam Angka**. Malang; BPS Kabupaten Malang.
-, 2001. **PDRB Kabupaten Malang**. Malang; BPS Kabupaten Malang.
- Glasson, J., 1977. **Pengantar Perencanaan Regional**. Terjemahan : Sitohang, P. Jakarta; FE UI.
- Jhingan, M.L., 1999. **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**. Jakarta; Rajawali Press.
- Kadariah. 1985. **Ekonomi Perencanaan**. Jakarta; FE- UI.
- Mosher, A.T., 1966. **Getting Agriculture Moving**. New York. Frederick A Prager Inc.
- Mubyarto. 1989. **Pengantar Ekonomi Pertanian**. Jakarta; LP3S.
- Partadiredja, A., 1983. **Perhitungan Pendapatan Nasional**. Jakarta. LP3S.
- Putranto, H., 1990. **Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Jember Sebagai Bagian dari Propinsi Jawa Timur: Studi Prioritas Sektor dan Komoditi Th 1986**. (Skripsi tidak dipublikasikan). Jember; FE UNEJ.
- Prayitno. 1985. **Ekonomi Pembangunan**. Yogyakarta; BPFE UGM.
- Raharjo, D., 1984. **Transformasi Pertanian menuju Industrialisasi**. Jakarta; LP3S.
- Sihombing, M., dkk., 2002, **Angka Pertanian Terus Anjlok - Sektor Pertanian Kian Sulit Diandalkan**. Jakarta; Bisnis Indonesia.
- Soekartawi. 1989. **Pembangunan Pertanian**. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
-, 1996. **Pembangunan Pertanian – Kemiskinan**. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian. 1989. **Perencanaan Pembangunan**. Semarang; Satya Wacana
- Sukirno. 1995. **Pengantar Teori Makro Ekonomi**. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrir. 1990. **Analisa Ekonomi Indonesia**. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tjokroamidjojo, B., 1987. **Perencanaan Pembangunan**. Jakarta; CV. Haji Mas Agung.

Lampiran 1a: PDsRB Pemerintah Daerah Jawa Timur dan PDsRB Pemerintah Kabupaten Malang Secara Sub-Sektoral Berdasarkan Harga Berlaku (Jutaan Rupiah) Menurut Lapangan Usaha Sub-Sektor Tanaman Pangan Tahun 1997-2000

| TAHUN | PROPINSI JAWA TIMUR | | KABUPATEN MALANG | |
|-------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Sub-S. T.P | S. Pertanian | Sub-S.T.P | S. Pertanian |
| 1997 | 8712078,1 | 14761007,25 | 824695,16 | 1151780,36 |
| 1998 | 17596100,38 | 28832429,04 | 1686580,29 | 2281406,55 |
| 1999 | 19722934,58 | 32775610,75 | 1728925,11 | 2311114,81 |
| 2000 | 21257376,27 | 35525625,50 | 1730068 | 2368582 |

Sumber : BPS Jawa Timur dan BPS Kabupaten Malang Tahun 1997 – 2000.



Lampiran 1b: Perhitungan LQ PDsRB Pemerintah Kabupaten Malang Atas Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Sub-Sektor Tanaman Pangan Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 1997 –2000.

| TAHUN | PROPINSI JATIM | Kabupaten Malang | |
|-------|-------------------|---|---|
| | | R ₁ | LQ |
| 1997 | 8712078,10 | $\frac{824695,16 : 8712078,1}{1151780,36 : 14761007,25}$ | $X100 = \frac{9,4661}{7,8028}$ = 1,21 |
| 1998 | 17596100,38 | $\frac{1686580,29 : 17596100,38}{2281406,55 : 28832429,04}$ | $X100 = \frac{9,5849}{7,9126}$ = 1,21 |
| 1999 | 19722934,58 | $\frac{172892511 : 1972293458}{231111481 : 3277561075}$ | $X100 = \frac{8,7661}{7,0513}$ = 1,24 |
| 2000 | 21257376,27 | $\frac{1730068 : 21257376,27}{2368582 : 35525625,50}$ | $X100 = \frac{8,1387}{6,6672}$ = 1,22 |

Sumber : Lampiran 1a diolah.

Lampiran 2a : PDsRB Pemerintah Daerah Jawa Timur dan PDsRB Pemerintah Kabupaten Malang Secara Sub-Sektoral Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993 (Jutaan Rupiah) Menurut Lapangan Usaha Sub-Sektor Tanaman Pangan Tahun 1997-2000

| TAHUN | PROPINSI JAWA TIMUR | | KABUPATEN MALANG | |
|-------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Sub-S. T.P | S. Pertanian | Sub-S.T.P | S. Pertanian |
| 1997 | 6431044,49 | 14761007,25 | 824695,16 | 1151780,36 |
| 1998 | 17596100,38 | 28832429,04 | 1686580,29 | 2281406,55 |
| 1999 | 19722934,58 | 32775610,75 | 1728925,11 | 2311114,81 |
| 2000 | 21257376,27 | 35525625,50 | 1730068 | 2368582 |

Sumber : BPS Jawa Timur dan BPS Kabupaten Malang Tahun 1997 – 2000.



Lampiran 2b: Perhitungan LQ PDsRB Pemerintah Kabupaten Malang Atas Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Sub – Sektor Tanaman Pangan Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1993 Antara Tahun 1997 –2000.

| TAHUN | PROPINSI JATIM | Kabupaten Malang | |
|-------|-------------------|--|---|
| | | R ₁ | LQ |
| 1997 | 6431044,49 | $\frac{576996 : 6431044}{803090 : 10360819,63}$ | $X100 = \frac{8,9720}{7,7512}$ = 1,16 |
| 1998 | 6448069,42 | $\frac{605626 : 6448069,42}{817997 : 9840471,06}$ | $X100 = \frac{9,3924}{8,3126}$ = 1,13 |
| 1999 | 6726179,75 | $\frac{640831 : 6726179,75}{846032 : 10056430,48}$ | $X100 = \frac{9,5274}{8,4128}$ = 1,13 |
| 2000 | 6738787,79 | $\frac{602137 : 6738787,79}{812228 : 10126777,37}$ | $X100 = \frac{8,9353}{8,0206}$ = 1,11 |

Sumber : Lampiran 2a diolah.

Lampiran 3a : Produksi Tanaman Bahan Makanan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dan Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Komoditi Padi dan Palawija Tahun 1997.

| KOMODITI | PEMDA JAWA TIMUR | PEMKAB MALANG |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | Ni | Si |
| Padi (Sawah & Ladang) | 8846406 | 380065 |
| Jagung | 3126669 | 220875 |
| Ubi Kayu | 3929540 | 444763 |
| Ubi Jalar | 214667 | 27922 |
| Kacang Tanah | 160028 | 2786 |
| Kacang Kedelai | 513052 | 1063 |
| Kacang Hijau | 73090 | 576 |
| | N = 16863452 | S = 1078050 |

Sumber : BPS Jawa Timur dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Malang.

Lampiran 3b : Perhitungan Location Quotient Komoditi Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 1997

| KOMODITI | JATIM | KABUPATEN MALANG | |
|------------------------|---------|--|---------------|
| | | R2 | LQ |
| Padi (Sawah&Ladang) | 8846406 | $\frac{380065:1078050}{8846406:16863452} \times 100 = \frac{35,2548}{52,459}$ | = 0,67 |
| Jagung | 3126669 | $\frac{220875:1078050}{3126669:16863452} \times 100 = \frac{20,4884}{18,5411}$ | = 1,1 |
| Ubi Kayu | 3929540 | $\frac{444763:1078050}{3929540:16863452} \times 100 = \frac{41,2562}{23,3021}$ | = 1,77 |
| Ubi Jalar | 214667 | $\frac{27922:1078050}{214667:16863452} \times 100 = \frac{2,59}{1,273}$ | = 2,03 |
| Kacang Tanah | 160028 | $\frac{2786:1078050}{160028:16863452} \times 100 = \frac{0,0986}{0,9489}$ | = 0,27 |
| Kacang Kedelai | 513052 | $\frac{1063:1078050}{513052:16863452} \times 100 = \frac{0,0986}{3,0424}$ | = 0,03 |
| Kacang Hijau | 73090 | $\frac{576:1078050}{73090:16863452} \times 100 = \frac{0,0534}{0,4334}$ | = 0,12 |

Sumber: Lampiran 3a diolah.

Lampiran 4a: Produksi Tanaman Bahan Makanan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dan Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Komoditi Padi dan Palawija Tahun 1998.

| KOMODITI | PEMDA JAWA TIMUR | PEMKAB MALANG |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | Ni | Si |
| Padi (Sawah & Ladang) | 8888433 | 400994 |
| Jagung | 3915865 | 265545 |
| Ubi Kayu | 3521295 | 486846 |
| Ubi Jalar | 239926 | 38668 |
| Kacang Tanah | 158930 | 3416 |
| Kacang Kedelai | 460773 | 839 |
| Kacang Hijau | 87121 | 38 |
| | N = 17272343 | S = 1196346 |

Sumber : BPS Jawa Timur dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Malang.

Lampiran 4b : Perhitungan Location Quotient Komoditi Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 1998.

| KOMODITI | JATIM | KABUPATEN MALANG | |
|--------------------------|---------|--|--|
| | | R2 | LQ |
| Padi (Sawah & Ladang) | 8888433 | $\frac{400994 : 1196346}{8888433 : 17272343} \times 100 =$ | $\frac{33,5182}{51,4604}$ = 0,65 |
| Jagung | 3915865 | $\frac{265545 : 1196346}{3915865 : 17272343} \times 100 =$ | $\frac{22,1963}{22,6713}$ = 0,98 |
| Ubi Kayu | 3521295 | $\frac{286517 : 1196346}{3521295 : 17272343} \times 100 =$ | $\frac{23,9493}{20,3868}$ = 1,17 |
| Ubi Jalar | 239926 | $\frac{38668 : 1196346}{239926 : 17272343} \times 100 =$ | $\frac{3,2321}{1,3891}$ = 2,33 |
| Kacang Tanah | 158930 | $\frac{3416 : 1196346}{158930 : 17272343} \times 100 =$ | $\frac{0,2855}{0,92}$ = 0,31 |
| Kacang Kedelai | 460773 | $\frac{839 : 1196346}{460773 : 17272343} \times 100 =$ | $\frac{0,071}{2,6676}$ = 0,02 |
| Kacang Hijau | 87121 | $\frac{38 : 1196346}{87121 : 17272343} \times 100 =$ | $\frac{0,0031}{0,5044}$ = 0,006 |

Sumber: Lampiran 4 a diolah.

Lampiran 5a : Produksi Tanaman Bahan Makanan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dan Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Komoditi Padi dan Palawija Tahun 1999.

| KOMODITI | PEMDA JAWA TIMUR | PEMKAB MALANG |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | Ni | Si |
| Padi (Sawah & Ladang) | 9024393 | 383690 |
| Jagung | 3381235 | 272980 |
| Ubi Kayu | 3940386 | 486846 |
| Ubi Jalar | 234677 | 50023 |
| Kacang Tanah | 176414 | 3971 |
| Kacang Kedelai | 417920 | 358 |
| Kacang Hijau | 83826 | 50 |
| | N = 17258851 | S = 1197918 |

Sumber : BPS Jawa Timur dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Malang.

Lampiran 5b: Perhitungan Location Quotient Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan Tahun 1999.

| KOMODITI | JATIM | KABUPATEN MALANG | |
|------------------------|---------|--|---|
| | | R2 | LQ |
| Padi (Sawah&Ladang) | 9024393 | $\frac{383690 : 1197918}{9024393 : 17258851} \times 100 =$ | $\frac{32,0297}{52,2885}$ = 0,612 |
| Jagung | 3381235 | $\frac{272980 : 1197918}{3381235 : 1725881} \times 100 =$ | $\frac{22,7879}{19,5913}$ = 1,16 |
| Ubi Kayu | 3940386 | $\frac{486846 : 1197918}{3940386 : 17258851} \times 100 =$ | $\frac{40,641}{22,8311}$ = 1,78 |
| Ubi Jalar | 234677 | $\frac{50023 : 1197918}{234677 : 17258851} \times 100 =$ | $\frac{4,1758}{1,3597}$ = 3,07 |
| Kacang Tanah | 176414 | $\frac{3971 : 1197918}{176414 : 17258851} \times 100 =$ | $\frac{0,3315}{1,0221}$ = 0,32 |
| Kacang Kedelai | 417920 | $\frac{358 : 1197918}{417920 : 17258851} \times 100 =$ | $\frac{0,0299}{2,4215}$ = 0,01 |
| Kacang Hijau | 83826 | $\frac{50 : 1197918}{83826 : 17258851} \times 100 =$ | $\frac{0,0042}{0,4857}$ = 0,009 |

Sumber: Lampiran 5b diolah.

Lampiran 6a : Produksi Tanaman Bahan Makanan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dan Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Komoditi Padi dan Palawija Tahun 2000.

| KOMODITI | PEMDA JAWA | PEMKAB MALANG |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | TIMUR | |
| | Ni | Si |
| Padi (Sawah & Ladang) | 9457107 | 349121 |
| Jagung | 3563706 | 249339 |
| Ubi Kayu | 4029366 | 357325 |
| Ubi Jalar | 212566 | 42241 |
| Kacang Tanah | 185580 | 3540 |
| Kacang Kedelai | 374976 | 773 |
| Kacang Hijau | 92985 | 100 |
| | N = 17916286 | S = 1002439 |

Sumber : BPS Jawa Timur dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Malang.

Lampiran 6b : Perhitungan Location Quotient Komoditi Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2000.

| KOMODITI | JATIM | KABUPATEN MALANG | |
|---------------------|---------|--|--|
| | | R2 | LQ |
| Padi (Sawah&Ladang) | 9457107 | $\frac{349121 : 1002439}{9457107 : 17916286} \times 100 =$ | $\frac{34,8271}{52,7849}$ = 0,66 |
| Jagung | 3563706 | $\frac{249339 : 1002439}{3563706 : 17916286} \times 100 =$ | $\frac{24,8732}{19,8909}$ = 1,25 |
| Ubi Kayu | 4029366 | $\frac{357325 : 1002439}{4029366 : 17916286} \times 100 =$ | $\frac{35,6455}{22,4899}$ = 1,58 |
| Ubi Jalar | 212566 | $\frac{42241 : 1002439}{212566 : 17916286} \times 100 =$ | $\frac{4,2138}{1,1864}$ = 3,55 |
| Kacang Tanah | 185580 | $\frac{3540 : 1002439}{185580 : 17916286} \times 100 =$ | $\frac{0,3531}{1,0358}$ = 0,34 |
| Kacang Kedelai | 374976 | $\frac{773 : 1002439}{374976 : 17916286} \times 100 =$ | $\frac{0,0771}{2,0929}$ = 0,04 |
| Kacang Hijau | 92985 | $\frac{100 : 1002439}{92985 : 17916286} \times 100 =$ | $\frac{0,0099}{0,5189}$ = 0,02 |

Sumber: Lampiran 6a diolah.

Lampiran 7 a : Produksi Tanaman Bahan Makanan Pemerintah Daerah Jawa Timur Dan Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Komoditi Padi dan Palawija Tahun 2001.

| KOMODITI | PEMDA JAWA | PEMKAB MALANG |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | TIMUR | |
| | Ni | Si |
| Padi (Sawah & Ladang) | 9843233 | 363541 |
| Jagung | 3435009 | 250570 |
| Ubi Kayu | 4136574 | 625079 |
| Ubi Jalar | 203462 | 52926 |
| Kacang Tanah | 191021 | 4603 |
| Kacang Kedelai | 331462 | 292 |
| Kacang Hijau | 70497 | 38 |
| | N = 18211258 | S = 1297049 |

Sumber : BPS Jawa Timur dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Malang.

Lampiran 7b : Perhitungan Location Quotient Komoditi Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2001

| KOMODITI | JATIM | KABUPATEN MALANG | |
|-----------------------|---------|--|--|
| | | R2 | LQ |
| Padi (Sawah & Ladang) | 9843233 | $\frac{363541 : 1297049}{9843233 : 18211258} \times 100 =$ | $\frac{28,0283}{54,0502}$ = 0,52 |
| Jagung | 3435009 | $\frac{250570 : 1297049}{3435009 : 18211258} \times 100 =$ | $\frac{19,3185}{18,862}$ = 1,02 |
| Ubi Kayu | 4136574 | $\frac{625079 : 1297049}{4136574 : 18211258} \times 100 =$ | $\frac{48,1924}{22,7144}$ = 2,12 |
| Ubi Jalar | 203462 | $\frac{52926 : 1297049}{203462 : 18211258} \times 100 =$ | $\frac{4,0805}{1,1172}$ = 3,65 |
| Kacang Tanah | 191021 | $\frac{4603 : 1297049}{191021 : 18211258} \times 100 =$ | $\frac{0,3549}{1,0489}$ = 0,34 |
| Kacang Kedelai | 331462 | $\frac{292 : 1297049}{331462 : 18211258} \times 100 =$ | $\frac{0,0225}{1,82}$ = 0,12 |
| Kacang Hijau | 70497 | $\frac{38 : 1297049}{70497 : 18211258} \times 100 =$ | $\frac{0,0029}{0,3871}$ = 0,007 |

Sumber: Lampiran 7a diolah.

Lampiran 8 : Perhitungan Koefisien Pergeseran Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan di Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 1997 - 1999.

| KOMODITI | 1997 | | 1999 | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Si/Ni | S/N | Si/Ni | S/N |
| Padi (Sawah & Ladang) | 0,04962 | 0,063928 | 0,042514 | 0,069408 |
| Jagung | 0,070642 | 0,063928 | 0,080734 | 0,069408 |
| Ubi Kayu | 0,113184 | 0,063928 | 0,123553 | 0,069408 |
| Ubi Jalar | 0,130071 | 0,063928 | 0,213157 | 0,069408 |
| Kacang Tanah | 0,017409 | 0,063928 | 0,022509 | 0,069408 |
| Kacang Kedelai | 0,002072 | 0,063928 | 0,000857 | 0,069408 |
| Kacang Hijau | 0,007881 | 0,063928 | 0,000596 | 0,069408 |

Sumber : Lampiran 3 dan lampiran 5 data diolah.

$$\begin{aligned}
 \text{CR (Komoditi Padi)} &= \frac{\%(0,042514 - 0,04962) - \%(0,069408 - 0,063928)}{100} \\
 &= \frac{-0,000448\% - 0,00548\%}{100} \\
 &= -0,00005928
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{CR (Komoditi Jagung)} &= \frac{\%(0,080734 - 0,070642) - \%(0,069408 - 0,063928)}{100} \\
 &= \frac{-0,010092\% - 0,00548\%}{100} \\
 &= 0,00004612
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{CR (Komoditi Ubi Kayu)} &= \frac{\%(0,123553 - 0,113184) - \%(0,069408 - 0,063928)}{100} \\
 &= \frac{-0,010369\% - 0,00548\%}{100} \\
 &= 0,00004889
 \end{aligned}$$

$$\text{CR (Komoditi Ubi Jalar)} = \frac{\%(0,213157 - 0,130071) - \%(0,069408 - 0,063928)}{100}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{0,083086\% - 0,00548\%}{100} \\ &= 0,00077606 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CR (Kmdt Kacang Tanah)} &= \frac{\%(0,022509 - 0,017409) - \%(0,069408 - 0,063928)}{100} \\ &= \frac{0,0061\% - 0,00548\%}{100} \\ &= -0,0000038 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CR (Komoditi Kedelai)} &= \frac{\%(0,000857 - 0,002072) - \%(0,069408 - 0,063928)}{100} \\ &= \frac{-0,001215\% - 0,00548\%}{100} \\ &= -0,00006695 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CR (Komoditi Kacang Hijau)} &= \frac{\%(0,000596 - 0,007881) - \%(0,069408 - 0,063928)}{100} \\ &= \frac{-0,007285\% - 0,00548\%}{100} \\ &= -0,00012765 \end{aligned}$$

Lampiran 9 : Perhitungan Koefisien Pergeseran Komoditi Sub-Sektor Tanaman Pangan di Pemerintah Kabupaten Malang 2000 – 2001.

| KOMODITI | 1999 | | 2000 | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Si/Ni | S/N | Si/Ni | S/N |
| Padi (Sawah & Ladang) | 0,042514 | 0,069408 | 0,036933 | 0,071222 |
| Jagung | 0,080734 | 0,069408 | 0,072946 | 0,071222 |
| Ubi Kayu | 0,123553 | 0,069408 | 0,15111 | 0,071222 |
| Ubi Jalar | 0,213157 | 0,069408 | 0,260127 | 0,071222 |
| Kacang Tanah | 0,022509 | 0,069408 | 1,024097 | 0,071222 |
| Kacang Kedelai | 0,000857 | 0,069408 | 0,000881 | 0,071222 |
| Kacang Hijau | 0,000596 | 0,069408 | 0,000539 | 0,071222 |

Sumber : Lampiran 5 dan Lampiran 7 data diolah.

$$\begin{aligned}
 \text{CR (Komoditi Padi)} &= \frac{\%(0,036933 - 0,042514) - \%(0,071222 - 0,069408)}{100} \\
 &= \frac{-0,005581\% - 0,001814\%}{100} \\
 &= -0,00007395
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{CR (Komoditi Jagung)} &= \frac{\%(0,072946 - 0,080734) - \%(0,071222 - 0,069408)}{100} \\
 &= \frac{-0,007788\% - 0,001814\%}{100} \\
 &= -0,00009602
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{CR (Komoditi Ubi Kayu)} &= \frac{\%(0,15111 - 0,123553) - \%(0,071222 - 0,069408)}{100} \\
 &= \frac{0,027557\% - 0,001814\%}{100} \\
 &= -0,00025743
 \end{aligned}$$

$$\text{CR (Komoditi Jalar)} = \frac{\%(0,260127 - 0,213157) - \%(0,071222 - 0,069408)}{100}$$

$$= \frac{0,260127\% - 0,001814\%}{100}$$

$$= 0,00045156$$

$$\text{CR (Kmdt Kacang Tanah)} = \frac{\%(0,024097 - 0,022509) - \%(0,071222 - 0,069408)}{100}$$

$$= \frac{0,001588\% - 0,001814\%}{100}$$

$$= -0,00000226$$

$$\text{CR (Komoditi Kedelai)} = \frac{\%(0,000881 - 0,000857) - \%(0,071222 - 0,069408)}{100}$$

$$= \frac{0,000024\% - 0,001814\%}{100}$$

$$= -0,0000179$$

$$\text{CR (Komoditi K. Hijau)} = \frac{\%(0,000539 - 0,000596) - \%(0,071222 - 0,069408)}{100}$$

$$= \frac{0,000057\% - 0,001871\%}{100}$$

$$= -0,00001871$$

